

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KESBANGPOL KOTA
JAKARTA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Penyusunan
Skripsi S1 Program Studi Ilmu Politik



Oleh:

Muhammad Zaky
(2106016105)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Zaky
NIM : 2106016105
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pada Pemilu Tahun 2024

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2024
Pembimbing,



Nafisah, M.A
NIP. 1995110922020122006

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KESBANGPOL KOTA JAKARTA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK PADA PEMILU 2024

Disusun oleh

Muhammad Zaky

2106016105

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 24 Desember
2024 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Nafisah M.A

NIP. 1995110922020122006

Sekretaris



Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

Penguji



M. Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

Dosen Pembimbing



Nafisah M.A

NIP. 1995110922020122006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Muhammad Zaky menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *"Strategi Komunikasi Politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pada Pemilu 2024"* merupakan karya hasil penulisan saya sendiri dan pada naskah yang saya tuliskan tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun pada Lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang didapatkan pada hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya sudah dijelaskan secara jelas pada tulisan dan daftar pustaka. Apabila dalam naskah ini mengandung unsur-unsur plagiarisme, maka saya siap untuk bertanggung jawab dan siap untuk menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 24 Desember 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Zaky

NIM. 2106016105

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala bentuk nikmat dan rahmat serta karunia -Nya yang tak terduga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”*Strategi Komunikasi Politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pada Pemilu 2024*” tanpa adanya sedikitpun halangan. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti Semoga kelak nanti kita termasuk kedalam golongan umat yang mendapatkan syafa’at serta dikumpulkan bersama dengan keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa yang penulis dapatkan merupakan sebuah hasil akhir dari proses pembelajaran selama berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan serta sumbangsih pemikiran dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam serta menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisong Semarang.
2. Dekan Fisip UIN Walisong, Prof. Imam Yahya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam serta menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisong Semarang
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Sekertaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Dosen pembimbing, Ibu Nafisah, M.A. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan, arahan, serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga

penulis mampu mengimplementasikan segala ilmu yang telah diberikan serta dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

6. Dosen wali, Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si yang telah memberikan saran serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen pengajar di Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu politik UIN Walisongo yang telah memberikan ilmu beserta bimbingannya sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo yang telah membantu dalam melancarkan segala kebutuhan penulis dalam melakukan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu penulis, Bapak Tri Satyawati S.E dan Ibu Anisa Fatihatun S.H serta keluarga atas segala bentuk dukungan motivasi, moral, dan material yang tak terhingga bagi penulis sehingga penulis sampai pada titik ini dengan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh jajaran Kesbangpol Kota Jakarta utara, Ormas PERKAPJU, Bapak Hendriko selaku sekretaris LSM Laskar NKRI, dan Zaki Amir selaku siswa SMA 18 Jakarta yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2021 khususnya teman satu kelas IP-C yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai penulis dalam menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang

Penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih kekurangan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis agar menjadi koreksi serta meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis berterima kasih banyak atas segala perhatian yang diberikan. Sekian,

Semarang, 24 Desember 2024

Penulis

Muhammad Zaky

2106016105

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Dengan segala Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tidak akan ada yang dapat menandingi kekuasaan -Nya

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Tri Satyawana dan Ibu Anisa Fatihatun yang telah berjuang dan rela memberikan biaya anaknya kuliah serta tidak pernah berhenti dalam memberikan doa-doa terbaik untuk anaknya.

Untuk dosen pembimbing Ibu Nafisah yang telah memberikan segala bimbingan, arahan, serta ilmunya agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.

Dan Untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang sudah menjadi tempat untuk saya belajar agar menjadi bekal saya dimasa yang akan datang.

MOTTO

“Gagal hanya terjadi ketika kita menyerah”

~ B.J. Habibie

ABSTRAK

Pada proses pelaksanaan kegiatan politik, masih sering ditemukannya tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk dapat membentuk karakter seseorang yang bertanggung jawab akan hak serta kewajibannya dalam menjalankan kehidupan demokrasi. Penelitian ini hendak mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Studi ini dilaksanakan dengan memberikan jawaban atas dua pertanyaan penelitian seperti sebagai berikut : 1) Bagaimana strategi komunikasi politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada Pemilu tahun 2024 di Kota Jakarta Utara?. 2) Bagaimana dampak dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara pada Pemilu tahun 2024?. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori komunikasi menurut Harold D. Lasswell untuk melihat bagaimana strategi komunikasi politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam menyelenggarakan pendidikan politik serta dampak pendidikan politik kepada beberapa lapisan masyarakat. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data lapangan yang diperoleh penulis dilakukan melalui wawancara, dilanjutkan dengan observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan strategi komunikasi politik dengan perumusan renstra yang merumuskan kegiatan pendidikan politik oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara. Kemudian, kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara menggunakan model dialog dan diskusi melalui kegiatan sosialisasi. Adapun kegiatan tersebut, berdampak kepada peningkatan partisipasi politik dan kesadaran politik masyarakat.

Kata Kunci : Komunikasi politik, pendidikan politik, partisipasi politik.

ABSTRACT

In the process of implementing political activities, low levels of community participation are often found. Political education is an effort made to shape the character of a person who is responsible for their rights and obligations in carrying out democratic life. This research aims to examine the efforts made by the North Jakarta City Kesbangpol in organizing political education. This study was carried out by providing answers to two research questions as follows: 1) What is the political communication strategy in organizing political education in the 2024 General Election in the City of North Jakarta? 2) What is the impact of the political education carried out by the North Jakarta City Kesbangpol on the 2024 Election? Data analysis in this research uses communication theory according to Harold D. Lasswell to see the political communication strategy of North Jakarta City Kesbangpol in providing political education and the impact of political education on several levels of society. This research uses qualitative methods and a case study approach. Field data obtained by the author was carried out through interviews, followed by observation and documentation. The results of the research show the process of planning a political communication strategy with the formulation of a strategic plan that formulates political education activities by Kesbangpol City of North Jakarta. Then, political education activities carried out by the North Jakarta City Kesbangpol used a dialogue and discussion model through outreach activities. These activities have an impact on increasing political participation and public political awareness.

Keywords: *Political communication, political education, political participation.*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
1. Manfaat teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis.....	4
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
1. Kajian Komunikasi Politik	5
2. Kajian Pendidikan Politik.....	6
F. TEORI PENELITIAN	8
1. Definisi Konseptual	8
2. Kerangka Teori.....	13
G. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sumber dan jenis data.....	14
3. Teknik pengumpulan data	15
4. Teknik analisis data	16
H. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI	19

A. Definisi Konseptual	19
1. Strategi.....	19
2. Komunikasi Politik.....	20
3. Pendidikan Politik	23
4. Pemilihan Umum.....	28
B. Landasan Teori.....	31
BAB III.....	35
GAMBARAN UMUM KESBANGPOL	35
KOTA JAKARTA UTARA	35
A. Kesbangpol Kota Jakarta Utara	35
1. Gambaran Umum Kesbangpol	35
2. Susunan Organisasi Kesbangpol.....	36
B. Gambaran Umum Kota Jakarta Utara.....	37
1. Kondisi Geografi Kota Jakarta Utara	37
2. Kondisi Demografi Kota Jakarta Utara	38
C. Ormas Kota Jakarta Utara	39
BAB IV	41
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KESBANGPOL.....	41
KOTA JAKARTA UTARA.....	41
A. Komunikasi Politik Langsung Kesbangpol Kota Jakarta Utara	41
B. Komunikasi Politik Kesbangpol Perspektif Model Komunikasi Lasswell.....	45
BAB V.....	53
DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK KESBANGPOL.....	53
KOTA JAKARTA UTARA.....	53
A. Dampak Pendidikan Politik terhadap Kesadaran Politik.....	54
B. Dampak Pendidikan Politik terhadap Peningkatan Partisipasi Kegiatan Politik	57
BAB VI	59
KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Susunan Organisasi Kesbangpol	36
Gambar 3. 2 Peta wilayah Kota Jakarta Utara	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Jumlah penduduk Kota Jakarta Utara	39
Tabel 4 1 Program pendidikan politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara.....	41
Tabel 4 2 Sasaran pendidikan politik gelombang 1	49
Tabel 4 3 Sasaran pendidikan politik gelombang 2	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Schemer, demokrasi merupakan wewenang yang dimiliki rakyat dalam mencapai keputusan politik yang mana setiap individu dapat memberikan suaranya terkait dengan diterima atau tidaknya para politisi yang berkuasa (Schumpeter 1976). Dalam mencapai sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemungutan suara yang sering disebut sebagai Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa *"Pemilu merupakan media yang digunakan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan partisipasi aktif dan diselenggarakan sesuai dengan asas umum, rahasia, jujur, serta adil"*.

Perlu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik sehingga masyarakat menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik agar memiliki rasa tanggung jawab dan dapat berpartisipasi mencapai tujuan politik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dijelaskan bahwa *"Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara"*. Dengan pendidikan politik, dapat membantu masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam serta sikap partisipatif terhadap proses politik sehingga dapat meminimalisir kekeliruan informasi yang diterima (Mendrofa 2024).

Namun, terdapat suatu permasalahan yang terjadi dimana rendahnya kesadaran masyarakat akan politik dengan dilihat kepada kurangnya partisipasi masyarakat Jakarta dalam kegiatan politik. Menurut Miriam Budiarto rendahnya partisipasi politik memiliki kaitan yang erat dengan adanya kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat (Budiarto 2008). Permasalahan tersebut dapat dilihat melalui adanya penurunan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dengan angka partisipasi 78,78 % sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 mencapai angka 79,28% (Prabowo 2024). Adanya tingkat partisipasi yang dimiliki Kota Jakarta Utara juga tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya pada Jakarta Timur tingkat partisipasinya berada pada angka 81,36%. Adapun pada

Jakarta Timur justru mengalami kenaikan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2024 (Anwar 2024).

Selain itu, salah satu isu yang cukup kritis dalam pemilihan umum ialah polarisasi politik yang dimana hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pilihan dalam politik yang dapat memicu terjadinya perselisihan dan perdebatan diantara masyarakat. Jika melihat kepada Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu, terdapat indikator konteks sosial-politik yang terjadi kenaikan angka kerawanan pada Kota Jakarta. Dalam Pemilu tahun 2019 kerawanan tersebut berada di angka 40,86% dan jika dalam Pemilu Tahun 2024 angka kerawanan tersebut mencapai 75,96%. Adapun spesifikasi dalam konteks sosial-politik meliputi isu SARA, adanya intimidasi, dan adanya perusakan fasilitas yang dapat mengganggu stabilitas pelaksanaan Pemilu serta dapat memicu kerusuhan, kekerasan, dan intimidasi yang terjadi dalam masyarakat pada proses penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas pemilu. Komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu Badan Kesatuan dan Politik menjadi penting untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pemilu 2024. Adanya strategi komunikasi politik yang baik dapat memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi politik dalam pelaksanaan Pemilu (Syah 2014). Upaya komunikasi politik tersebut, dapat dilakukan melalui adanya kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pendidikan politik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu atau pemerintah kepada masyarakat (Fathurrijal et al. 2024). Sebaliknya, jika terdapat komunikasi politik yang kurang baik dapat memberikan dampak kepada rendahnya partisipasi politik (Paluvi, Ofianto, and Mulyani 2024).

Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk guna melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwa Kesbangpol memiliki Tugas dan Fungsi untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan pemantauan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

tahun 2010 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah melalui Kesbangpol memiliki tugas serta peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik.

Dalam merespon hal tersebut, untuk merealisasikan pelaksanaan pemilu yang berdaulat, Kesbangpol Kota Jakarta Utara bersama beberapa jajarannya mendirikan posko bersama pemilu. Adanya posko bersama pemilu, merupakan salah satu upaya yang dilakukan kesbangpol dalam merealisasikan fungsinya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemilu. Dengan didirikannya posko ini, bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu, mencegah adanya permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, memberikan masukan terkait pemecahan permasalahan dalam pemilu, dan melaporkan informasi-informasi terkait pemilu. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas dalam pelaksanaan pemilu, Kesbangpol Kota Jakarta Utara mengadakan kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman Undang-Undang bidang politik yang bertujuan untuk mempererat persatuan ditengah masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan pada Pemilu 2024 Kota Jakarta Utara.

Penelitian terdahulu terkait pendidikan politik yang menyoroti adanya peranan Kesbangpol dalam menjalankan peranannya dalam melaksakan pendidikan politik. Adapun beberapa upaya yang dilakukan kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilkada, mengadakan sosialisasi organisasi kemasyarakatan, memberikan arahan kepada organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, dan memberikan materi politik sebagai bentuk upaya pendidikan politik melalui media sosial. Adapun beberapa hambatan umum dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik meliputi adanya keterbatasan anggaran dan tidak adanya silabus dalam melaksanakan kegiatan tersebut (Khasanah and Saraswati 2024; Hasanah et al. 2021; Khadavi 2023; Ashariadi 2020; Kristian 2022).

Dengan terjadinya permasalahan terkait penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Kota Jakarta yang merepresentasikan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap politik. Diharapkan melalui adanya pendidikan politik yang baik mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pada pelaksanaan Pemilu. Selain itu, dengan adanya pendidikan politik yang baik juga diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan pilihan dalam Pemilu. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan meneliti terkait strategi komunikasi politik kesbangpol

Kota Jakarta Utara dengan sebuah judul "Strategi Komunikasi Politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pemilu Tahun 2024".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, pada penulisan penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik pada Pemilu tahun 2024 di Kota Jakarta Utara?
2. Bagaimana dampak dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara pada Pemilu tahun 2024?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pada penulisan ini mendapati tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis terkait strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol menyelenggarakan pendidikan politik pada Pemilu tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.
2. Untuk menganalisis dampak dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara pada Pemilu tahun 2024

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mendapatkan manfaat seperti sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan hasil penulisan penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang khususnya jurusan Ilmu Politik. Berdasarkan manfaat teoritis tersebut, diharapkan pada penulisan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca terkait dengan peranan Pemerintahan Daerah khususnya Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait yang ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan pelaksanaan pemilihan umum di Kota Jakarta Utara.

- b. Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam proses perwujudan negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, terdapat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah yang dimana dalam proses tersebut melibatkan beberapa pihak serta keberhasilan dari pemilu dapat menentukan jalannya pemerintahan kedepannya. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu khususnya pada tingkat partisipasi masyarakat yang menurun jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019. Selain itu, terdapat adanya kenaikan tingkat kerawanan pada konteks sosial-politik khususnya di daerah Jakarta yang dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik antar masyarakat.

Berdasarkan adanya beberapa permasalahan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang guna untuk menciptakan pelaksanaan pemilu atau pilkada yang sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, atas adanya kedua hal yang saling berkaitan tersebut penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi dua point penting yaitu komunikasi politik dan pendidikan politik sebagai bentuk upaya melaksanakan pemilu atau pilkada yang berdaulat sebagai berikut :

1. Kajian Komunikasi Politik

Berdasarkan adanya kajian terdahulu mengenai komunikasi politik, ditemukan adanya beberapa penelitian yang membahas mengenai strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN. Penelitian tersebut dilakukan oleh (Apriliana 2023) menyatakan bahwa adanya komunikasi politik yang baik dapat mempengaruhi penurunan pelanggaran netralitas ASN. Adapun beberapa upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh bawaslu seperti dengan dilakukannya sosialisasi kepada para ASN, memberikan surat himbuan, dan mengadakan diskusi secara terarah. Sama halnya dengan penelitian tersebut, (Irmawanti, Umran, and Jalil 2023) menjelaskan terkait dengan adanya beberapa strategi komunikasi yang dilakukan bawaslu seperti dilakukannya koordinasi oleh ketua bawaslu provinsi kepada bawaslu kabupaten atau kota dan memanfaatkan media

sosial sebagai wadah untuk menyebarkan informasi terkait dengan netralitas.

Adapun beberapa penelitian lain yang menganalisis terkait dengan komunikasi politik juga telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, fokus penelitian tersebut mengarah kepada strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik dan salah satu organisasi islam dalam memenangkan kontestasi pemilu atau pilkada. Kajian terkait dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh partai dilakukan oleh (Pattiasina 2015) melihat adanya beberapa upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh partai PDI dengan melaksanakan kegiatan kampanye baik secara langsung atau secara tidak langsung. Adanya pelaksanaan kampanye secara langsung dilakukan dengan mempersiapkan materi-materi yang menjawab keresahan masyarakat umum dan kampanye secara tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan materi kampanye. Penelitian oleh (Alvin 2022) menjelaskan terkait dengan adanya strategi komunikasi politik caleg PSI dengan melalui relasi yang sudah dibangun sebelum mencalonkan diri dan memasang beberapa APK.

Kemudian dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Sofyan, Laksono, and Chabibi 2020) membahas mengenai strategi komunikasi politik organisasi islam untuk memenangkan kontestasi pemilu dan pilkada. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pengajian sekaligus untuk memperkenalkan calon pasangan dan mengadakan kegiatan kuliah umum dengan tema kebangsaan. Selaras dengan penelitian tersebut, (Sutangga, Kadri, and Fahri 2023) menemukan adanya elit NU yang ikut serta secara aktif sebagai media komunikasi politik yang dimana para elit NU tersebut melakukan kunjungan kepada masyarakat baik secara langsung atau kelembagaan. Adapun strategi lainnya yang digunakan adalah dengan memanfaatkan adanya relasi organisasi, kegiatan amaliah yang diselenggarakan oleh NU, dan tuan guru NU guna untuk menyampaikan pesan-pesan politik.

2. Kajian Pendidikan Politik

Berdasarkan adanya kajian terdahulu yang membahas pendidikan politik, penulis mendapati peranan partai politik yang memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat. Penelitian yang ditulis oleh (Indah Pratiwi, Setio Rahayu 2020) berpendapat bahwa peranan partai politik dapat memberikan dampak kepada pembentukan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik dengan memberikan pendidikan politik melalui pelibatan generasi muda dalam kegiatan politik. Sama halnya dengan penelitian tersebut, (Juanda and Juanda 2023) berpendapat bahwa adanya peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam politik melalui penyelenggaraan Pemilu yang berdaulat.

Adapun peneliti menemukan beberapa penelitian lain yang menganalisis terkait pendidikan politik yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, fokus penelitian tersebut mengarah kepada pendidikan politik yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah melalui Kesbangpol. Kajian tersebut dilakukan oleh (Khasanah and Saraswati 2024) yang berpendapat bahwa Kesbangpol merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki wewenang untuk menjamin kehidupan berbangsa serta berpolitik dengan melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khadavi 2023) dan (Nur Hasanah, Sry Reski Mulka, Hafizh Yudhistira I 2021) mendapati adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik seperti mengadakan kegiatan sosialisasi, dan upaya pemanfaatan organisasi kemasyarakatan yang kemudian Ormas yang sudah terdaftar tersebut melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat umum.

Berdasarkan beberapa kajian terkait pendidikan politik, dapat dilihat bahwa secara umum ditemukan adanya permasalahan mengenai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang cukup rendah akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi adanya penurunan tingkat partisipasi dengan mengadakan kegiatan seperti pendidikan politik. Beberapa upaya pendidikan politik tersebut, dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dapat berupa penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang membahas mengenai hal-hal yang menyangkut kepada politik.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai komunikasi politik, ditemukan beberapa upaya yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan politik yang sedang terjadi. Adapun dalam penelitian-penelitian tersebut, juga mendapati adanya pemanfaatan komunikasi politik yang digunakan untuk

memperoleh suatu keberhasilan dalam substansi terkait politik. Berdasarkan adanya upaya pendidikan politik, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai strategi komunikasi politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik kesbangpol dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik pada Pemilu Tahun 2024.

F. TEORI PENELITIAN

1. Definisi Konseptual

a) Komunikasi Politik

Secara umum, manusia merupakan makhluk sosial yang dimana interaksi termasuk kedalam kebutuhan secara mendasar yang dimiliki oleh manusia. Ketika berbicara mengenai interaksi, terdapat proses pertukaran diantara satu orang dengan orang lainnya yang kemudian menafsirkan informasi tersebut dan memberikan tanggapan. Oleh karena itu, proses komunikasi tersebut dapat diposisikan sebagai suatu kegiatan yang melekat dengan proses interaksi (Indrawan 2018).

Tommy Suprpto dalam buku Komunikasi Politik mengatakan bahwa kata "Komunikasi" merupakan kata yang berasal dari bahasa latin dari *Communication* berasal dari kata *Communis* yang berarti "sama". Secara Umum, dalam komunikasi diperlukan adanya kesamaan makna agar terciptanya proses bertukar pikiran diantara komunikan (penerima pesan) dengan Komunikator (penyebarkan pesan) (Pureklolon 2018).

Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan, terdapat dua macam proses komunikasi. Menurut Uchjana Effendy, proses komunikasi terdiri dari komunikasi primer dan komunikasi skunder. Proses komunikasi skunder merupakan suatu proses pemberian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui perantara atau dengan menggunakan alat serta sarana lain misalnya penyampaian pesan melalui *handphone*. Proses komunikasi primer merupakan suatu proses komunikasi yang didalamnya terdapat penyampaian pikiran komunikator kepada komunikan melalui lambang yang dimana proses komunikasi tersebut dapat dilakukan secara *face to face* (Hikmat 2019).

Sedangkan komunikasi Politik merupakan proses pemberian pesan yang didalamnya mengandung informasi-informasi terkait politik, dimana hal tersebut terdapat kaitannya dengan lembaga atau kekuasaan dan disampaikan oleh informan kepada komunikan (Pureklolon 2018). Menurut Astrid S. Susanto mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang diadakan guna untuk mendapatkan suatu pencapaian sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan serta dapat menentukan suatu sanksi yang mengikat seluruh masyarakat yang telah disepakati oleh lembaga politik (Hikmat 2019).

Dalam proses berlangsungnya suatu komunikasi, terdapat beberapa unsur yang menjadi pendukung terlaksananya suatu proses komunikasi, yaitu : Pertama, sumber atau sering disebut sebagai komunikator sebagai pihak yang memberikan atau membuat informasi. Kemudian dalam proses komunikasi tersebut, sumber dapat berupa satu orang atau lebih misalnya suatu organisasi, partai politik, dan pemerintah. Kedua, pesan merupakan segala sesuatu yang diberikan dari komunikator kepada penerima. Ada beberapa cara untuk menyampaikan pesan diantara dapat dilakukan secara langsung atau *face to face* dan dapat dilakukan melalui media sosial. Ketiga, penerima Informasi merupakan pihak yang mendapatkan informasi dari sumber atau komunikator. Keempat, saluran merupakan alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan dan saluran ini dapat berupa media cetak serta media elektronik. Kelima, tanggapan atau *feedback* merupakan suatu reaksi yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator (Indrawan 2018).

Dalam proses komunikasi politik, terdapat beberapa ilmuwan yang memberikan bentuk-bentuk komunikasi yang berbeda-beda akan tetapi makna yang dikandung didalamnya memiliki arti yang sama. Menurut Arifin (2003) dalam buku komunikasi politik teori dan praktik menjelaskan beberapa bentuk-bentuk komunikasi politik sebagai berikut :

1. Retorika

Retorika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Rhetorica*" memiliki arti seni berbicara. Menurut Aristoteles berpendapat bahwa retorika dibagi kedalam tiga jenis seperti : (1) retorika dilibratif yang berarti suatu retorika yang digunakan untuk dapat

memberikan pengaruh kepada publik terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap dapat memberikan dampak keuntungan atau kerugian jika kebijakan tersebut diimplementasikan; (2) retorika forensik merupakan suatu retorika yang memiliki kaitan dengan keputusan pengadilan; (3) retorika demonstratif merupakan suatu retorika yang digunakan pada konteks memuji atau menghina.

2. Agitasi Politik

Berasal dari bahasa latin yaitu "*Agitare*" memiliki arti menggerakkan atau bergerak. Menurut Harbert Blumer adanya agitasi dapat digunakan guna untuk menggerakkan masyarakat umum terhadap suatu gerakan politik yang dapat dilakukan dengan cara memberikan dorongan secara emosional kepada khalayak umum.

3. Propaganda

Kata propaganda berasal dari bahasa latin "*propagare*" memiliki arti menanamkan suatu tunas tanaman. Menurut W. Dobb dalam suatu negara demokrasi propaganda dapat dimaknai dengan adanya usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan suatu kepentingan tertentu guna untuk dapat mengontrol individu lainnya.

4. Public Relations

Merupakan suatu upaya yang dilakukan guna untuk mengimbangi atas lahirnya bentuk propaganda yang diduga dapat membahayakan pada segi politik dan sosial.

5. Kampanye Politik

Kampanye politik merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok pada kurun waktu tertentu dan bertujuan untuk mendapatkan suatu dukungan yang berasal dari masyarakat umum.

6. Lobi Politik

Lobi dapat dimaknai sebagai suatu tempat yang pada umumnya digunakan oleh para tamu-tamu untuk menunggu dengan dihadiri oleh para politikus dan disertai dengan adanya proses interaksi secara ringan atau secara informal tetapi memiliki makna yang penting.

7. Lewat media masa

Menurut Mc Luhan adanya penyebaran pesan politik melalui

media masa dianggap sebagai salah satu bentuk upaya perluasan komunikasi yang tidak dapat dijangkau oleh bentuk-bentuk komunikasi lainnya (Hikmat 2011).

b) Pendidikan Politik

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dijelaskan bahwa *"Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara"*. Maka dari itu, dengan diselenggarakannya pendidikan politik diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran akan peranan yang dimiliki dan mencingkatnya angka partisipasi masyarakat dalam politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira dalam (Firmansyah Noor Affandi, Tri Suilistyaningsih 2019) pendidikan politik merupakan aktifitas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan karakter dan memunculkan orientasi politik pada pribadi masyarakat. Selain itu, pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat memberikan partisipasinya dalam sistem politik yang sesuai dengan paham sistem demokrasi.

Menurut Kartono dalam (Haryanti 2021) mengatakan bahwa pendidikan politik memiliki beberapa tujuan, seperti :

1. Membantu masyarakat untuk memahami kondisi sosial politik yang rawan akan konflik, pembentukan karakter masyarakat yang berani untuk memberikan kritik yang membangun terhadap kondisi politik
2. Mampu untuk menyadarkan masyarakat sebagai warganegara akan peranan dari setiap individu serta agar masyarakat mampu berperan aktif dalam setiap proses politik sehingga mampu mewujudkan pembangunan bangsa dan negara.

c) Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa *"Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan*

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pemilu tersebut perlu dilandasi oleh beberapa asas yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan ”*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Secara lebih lanjut, beberapa asas tersebut dapat dimaknai sebagai:

1. Langsung, dimaknai sebagai pelaksanaan pemilu yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan memilih salah satu calon sesuai dengan keyakinan hati tanpa adanya perantara.
2. Umum, dapat dimaknai dengan adanya pemilu dapat berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain.
3. Bebas, dapat dimaknai dengan setiap individu berhak untuk memilih salah satu calon dalam pemilu tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan tekanan dari pihak lainnya.
4. Rahasia, dapat dimaknai dengan adanya jaminan bagi para pemilih atas kerahasiaan dalam memberikan suaranya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pemilih.
5. Jujur, dapat dimaknai dengan adanya sikap jujur serta tidak melakukan kecurangan yang dimiliki oleh penyelenggara maupun masyarakat dalam Pemilu.
6. Adil, dapat dimaknai dengan semua pihak yang memiliki keterlibatan harus mendapatkan perlakuan yang sama rata (Wibowo, Wardhana, and Nurgiansih 2022).

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya beberapa asas yang dapat dipatuhi oleh penyelenggara maupun masyarakat dapat menciptakan Pemilu yang berdaulat. Kemudian, dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana pendidikan politik Kesbangpol

2. Kerangka Teori

1. Komunikasi Politik

Jika berbicara mengenai komunikasi politik, terdapat beberapa ahli yang memberikan gagasannya terkait topik tersebut. Salah satunya ialah Harold D. Lasswell yang merupakan seorang sarjana kontemporer di Universitas Chicago. Dalam beberapa karya ilmiah yang dituliskan oleh Lasswell membahas mengenai analisis dampak atas pesan-pesan propaganda yang dilaksanakan oleh beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan Amerika dalam perang dunia ke-1.

Salah satu model komunikasi yang diberikan oleh Lasswell pada tahun 1948 guna untuk menganalisis terkait dengan komunikasi didasari atas lima dasar yaitu : *"who?, says what?, "in which channel?", to whom?, with what effect?"*. Dalam model tersebut terdapat *"who"* yang diartikan sebagai "siapa" atau dapat dimaknai sebagai komunikator. Dalam suatu proses komunikasi, terdapat komunikator yang memulai suatu proses komunikasi serta didalamnya terdapat faktor-faktor yang melandasi seorang komunikator. *"Says what?"* dimaknai sebagai "apa yang dikatakan" atau dapat dimaknai sebagai pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat berupa simbol-simbol verbal atau non-verbal. *"In which channel?"* dimaknai sebagai media yang digunakan oleh seorang komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung. *"To whom?"* dimaknai sebagai komunikan atau orang yang mendapatkan pesan dari komunikator. *"With what effect"* dimaknai dengan dampak apa yang terjadi setelah seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif atau dampak negatif.

Model komunikasi yang dibawakan oleh Lasswell tersebut dikenal sebagai model komunikasi yang bersifat linear atau satu arah. Artinya dalam proses komunikasi, terdapat peranan komunikator yang memberikan pesan secara langsung atau tidak langsung kepada komunikan tanpa adanya *feedback* atau respon yang diberikan oleh komunikan. Berdasarkan adanya sifat komunikasi yang linear, biasanya komunikasi model Lasswell digunakan sebagai ajakan atau perintah yang digunakan kepada seseorang atau lembaga (Lasswell 1948).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell sebagai acuan untuk menganalisis terkait strategi komunikasi politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam penyelenggaraan pendidikan politik pada Pemilu Tahun 2024.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti objek yang alamiah, dimana posisi seorang peneliti sebagai instrumen kunci dari penelitian. Oleh karena itu, dengan menjadikannya penulis sebagai instrumen kunci maka dapat menghasilkan data secara mendalam. Pengumpulan data yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif tidak dilandasi atas adanya teori, melainkan dilandasi atas fakta-fakta yang terjadi pada lapangan (Sugiyono 2012).

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis terkait strategi komunikasi kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik pada Pemilu Tahun 2024. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian studi kasus, penulis mencoba untuk memberikan gambaran terkait dengan subjek penelitian secara keseluruhan (Arikunto 1990, 314).

Menurut Asmussen & Creswell mengartikan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan memahami suatu permasalahan secara rinci. Dalam penggunaan studi kasus, perlu mengumpulkan permasalahan secara luas guna untuk menjelaskan permasalahan secara mendalam (Creswell 2013, 123). Oleh karena itu, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Karena dalam mendapatkan informasi terkait strategi komunikasi yang dilakukan oleh kesbangpol Kota Jakarta Utara, penulis ikut serta secara langsung di lapangan.

2. Sumber dan jenis data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data penelitian adalah dari mana seorang penulis mendapatkan data (Arikunto 2002, 102). Dalam penelitian ini, mendapati dua sumber dan jenis data yang diperlukan dalam proses penelitaian yaitu :

a) Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara langsung melalui informan yang mengetahui secara jelas suatu

kejadian yang terjadi terkait permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono 2013, 225). Kelebihan dari menggunakan sumber data primer diantaranya adalah meminimalisir kekeliruan informasi yang diperoleh karena data yang dibutuhkan oleh peneliti dapat diperoleh secara langsung dan kekurangan dari sumber data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun informan yang termasuk dalam penelitian ini meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Utara, Ormas, LSM, dan Sekolah Menengah Atas.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh seorang peneliti (Sugiyono 2013, 225). Data yang diperoleh secara tidak langsung dapat diperoleh seorang peneliti melalui sumber dokumen. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa data terkait dengan pendidikan politik melalui dokumen yang diberikan oleh informan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang diperlukan dalam sebuah penelitian, karena adanya teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data. Dengan tidak mengetahui teknik pengumpulan data, penulis tidak akan mendapatkan kumpulan-kumpulan data yang memenuhi kebutuhan penelitian (Sugiyono 2013, 224). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dapat dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam (Prof. Dr. Conny R.Semiawan 2010). Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data dengan narasumber ketua bidang idewasbangpol, ormas, LSM, dan Sekolah Menengah Atas.

b) Observasi

Menurut Guba dan Lincoln observasi merupakan kegiatan menggunakan pancaindera, penglihatan, penciuman, atau pendengaran guna untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan

yang terjadi (Amir Hamzah 2019). Setelah dilakukannya tahapan wawancara, penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian guna untuk membuktikan realitas yang terjadi dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Pengamatan objek kajian yang dilakukan dengan melakukan pencatatan terkait strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara.

c) Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, metode dokumentasi merupakan metode yang dapat dilakukan dengan cara mencari data yang berasal dari catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Arikunto 2002, 131).

Setelah menggunakan metode wawancara dan observasi, penulis mengumpulkan data-data terkait strategi komunikasi politik yang digunakan melalui metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen tertulis.

4. Teknik analisis data

Menurut Miles dan Huberman (1984) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas (Sugiyono 2013, 246). Pada model analisis data tersebut, dapat dilakukan oleh seorang peneliti ketika mendapatkan data yang diperoleh melalui tahapan wawancara. Kemudian pada tahapan tersebut seorang peneliti merasa tidak memuaskan, maka dapat dilanjutkan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait sampai seorang peneliti merasa data yang diperoleh sudah cukup memadai. Dalam model tersebut, mengemukakan bahwa proses analisis data dapat dilakukan oleh seorang peneliti pada saat dilapangan yang kemudian dilakukan beberapa tahapan seperti :

a) *Data reduction* (Reduksi Data)

Setelah seorang peneliti mendapatkan data terkait permasalahan, seorang peneliti perlu mereduksi data yang diperoleh. Adanya tahapan untuk mereduksi data diperlukan oleh seorang peneliti karena pada awalnya seorang peneliti memiliki data yang cukup banyak. Kemudian peneliti dapat memilah data tersebut dengan merangkum hal-hal yang dianggap penting (Sugiyono 2013, 247).

b) *Data Display* (Penyajian data)

Setelah seorang peneliti mereduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan cara naratif (Sugiyono 2013, 249).

c) *Concluding Drawing/Verification*

Menurut Miles dan Huberman tahapan ini diartikan sebagai pembuatan kesimpulan dan verifikasi, artinya setelah mereduksi data yang diperoleh seorang peneliti perlu melakukan penarikan kesimpulan terkait data yang diperoleh dan dapat terjadi perubahan jika ditemukan data terbaru (Sugiyono 2013, 252). Dengan demikian, setelah dilakukan pembuatan kesimpulan diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang terjadi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I, penulis menyajikan terkait latar belakang permasalahan pada penelitian serta didalamnya memuat adanya rumusan masalah dan kemudian dijelaskan terkait tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, Pada BAB I akan menjelaskan terkait dengan pendekatan serta metode yang digunakan dalam penelitian,

BAB II TEORI KOMUNIKASI POLITIK

Dalam BAB II menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, yang sebelumnya sudah dijelaskan secara ringkas dalam proposal penelitian. Kemudian dalam BAB II ini menjelaskan terkait dengan teori komunikasi politik secara menyeluruh seperti sejarah, definisi, dan implementasi teori dalam permasalahan penulisan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAKARTA UTARA

Pada BAB III, menjelaskan terkait dengan gambaran secara umum Kesbangpol seperti profil Kesbangpol Kota Jakarta Utara, gambaran umum Kota Jakarta Utara, dan Ormas di Kota Jakarta Utara sebagai objek dari penelitian ini.

BAB IV STRATEGI KEBANGPOL KOTA JAKARTA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024

Pada BAB IV, menjelaskan terkait dengan hasil analisis terkait strategi komunikasi yang digunakan Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam penyelenggaraan

pendidikan politik pada Pemilu tahun 2024.

BAB V DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK KESBANGPOL KOTA JAKARTA UTARA PADA PEMILU TAHUN 2024

Pada BAB V, menjelaskan terkait dampak pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara pada Pemilu tahun 2024.

BAB VI PENUTUP

Pada BAB ini, memaparkan hasil kesimpulan mengenai penjelasan permasalahan dalam penelitian ini guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang terjadi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Konseptual

1. Strategi

Secara umum, strategi merupakan suatu upaya dilakukan untuk dapat memperoleh tujuan tertentu dengan cara menyatukan seluruh kekuatan yang ada serta menyatukan sumber daya agar dapat menghadapi segala bentuk hambatan dan tantangan yang akan terjadi. Maka dari itu, dalam suatu strategi dapat meliputi beberapa unsur seperti perencanaan, gagasan, dan pelaksanaan. (Budiana 2022). Kemudian menurut Grant (1999) dalam (Budiana 2022) mengatakan bahwa adanya strategi menjadi penting dalam mencapai tujuan yang dimiliki oleh suatu organisasi, terdapat tiga peranan yaitu :

a. Strategi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan

Strategi merupakan suatu unsur penting dalam mendukung keputusan pada organisasi. Pada konteks tersebut, strategi dapat memberikan kejelasan terkait bagaimana suatu kebijakan dapat diimplementasikan oleh individu atau organisasi dalam memperoleh suatu tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu, dengan tidak adanya strategi suatu keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Strategi sebagai sarana dalam komunikasi dan koordinasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan pada organisasi, diperlukan adanya komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh antar individu, Maka dari itu, peranan strategi menjadi penting agar dapat menciptakan komunikasi serta koordinasi sehingga dapat terwujudnya kerja sama yang padu padan diantara individu tersebut. Dengan tidak adanya komunikasi dan koordinasi dapat sulit dalam merealisasikan suatu tujuan.

c. Strategi sebagai target

Secara konseptual, strategi merupakan unsur yang dapat dijadikan sebagai jembatan bagi visi dan misi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Melalui suatu strategi, maka suatu misi yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk mencapai suatu target yang sebelumnya sudah ditentukan, diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan oleh setiap individu. Sehingga setiap individu tersebut

dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai suatu target. Dengan demikian, agar suatu strategi dapat dilaksanakan oleh setiap individu perlu direncanakan secara matang, dilaksanakan dengan baik, dan dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Kemudian, menurut Hatten dan Hatten (1996) dalam (Budiana 2022) mengatakan bahwa perlu terdapat beberapa hal yang menjadikan suatu strategi menjadi maksimal seperti : (a) adanya strategi perlu dilaksanakan secara konsisten dan dibuat dengan mengikuti perkembangan masyarakat, (b) perlu adanya strategi cadangan yang dimiliki oleh setiap organisasi, jika terdapat strategi yang cukup banyak perlu selaras dengan strategi yang lainnya, (c) strategi yang baik hendaknya menggabungkan seluruh sumber daya, (d) strategi hendaknya mempertimbangkan adanya resiko yang tidak terlalu besar, (e) strategi hendaknya dilandasi atas keberhasilan yang sebelumnya sudah didapatkan, (f) keberhasilan suatu strategi dapat dilihat dari dukungan pihak-pihak terkait.

2. Komunikasi Politik

Secara umum, manusia merupakan makhluk sosial yang dimana interaksi termasuk kedalam kebutuhan secara mendasar yang dimiliki oleh manusia. Ketika berbicara mengenai interaksi, terdapat proses pertukaran diantara satu orang dengan orang lainnya yang kemudian menafsirkan informasi tersebut dan memberikan tanggapan. Oleh karena itu, proses komunikasi tersebut dapat diposisikan sebagai suatu kegiatan yang melekat dengan proses interaksi (Indrawan 2018).

Tommy Suprpto dalam buku Komunikasi Politik mengatakan bahwa kata "Komunikasi" merupakan kata yang berasal dari bahasa latin dari *Communication* berasal dari kata *Communis* yang berarti "sama". Secara Umum, dalam komunikasi diperlukan adanya kesamaan makna agar terciptanya proses bertukar pikiran diantara komunikan (penerima pesan) dengan Komunikator (penyebarnya) (Pureklolon 2018). Menurut Aristoteles, pada bukunya yang berjudul *Rethoric* menyampaikan terkait definisi komunikasi yang sangat sederhana yaitu "siapa?, mengatakan apa?, dan kepada siapa?" (Hafied Cangara 2009).

Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan, terdapat dua macam proses komunikasi. Menurut Uchjana Effendy, proses komunikasi terdiri dari komunikasi primer dan komunikasi skunder. Proses komunikasi skunder merupakan suatu proses pemberian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui perantara atau dengan menggunakan alat serta sarana lain misalnya penyampaian pesan

melalui *handphone*. Proses komunikasi primer merupakan suatu proses komunikasi yang didalamnya terdapat penyampaian pikiran komunikator kepada komunikan melalui lambang yang dimana proses komunikasi tersebut dapat dilakukan secara *face to face* (Hikmat 2019).

Sedangkan komunikasi Politik merupakan proses pemberian pesan yang didalamnya mengandung informasi-informasi terkait politik, dimana hal tersebut terdapat kaitannya dengan lembaga atau kekuasaan dan disampaikan oleh informan kepada komunikan (Pureklolon 2018). Menurut Astrid S. Susanto dalam (Hikmat 2019) mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang diadakan guna untuk mendapatkan suatu pencapaian sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan serta dapat menentukan suatu sanksi yang mengikat seluruh masyarakat yang telah disepakati oleh lembaga politik. Menurut Maedow dalam Nimmo (2004) mendefinisikan terkait komunikasi politik "*political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system*". Dalam ungkapan yang ia sampaikan, Maedow memberikan penekanan terhadap pesan atau simbol yang disampaikan oleh komunikator sebaiknya memiliki dampak terhadap system politik (Hafied Cangara 2009).

Menurut Lucian Pye diantara komunikasi dengan politik erat hubungannya dan istimewa karena keduanya berada satu ranah yang sejalan. Dalam politik, unsur komunikasi ditempatkan pada posisi yang sangat mendasar (fundamental). Adapun Pye mengemukakan suatu ungkapan yang mengatakan "tanpa suatu jaringan atau proses komunikasi yang dapat memberikan dampak pembesaran (*enlarging*) serta melipat gandakan (*magnifying*) pembesar pilihan-pilihan serta ucapan-ucapan para individu, tidak akan ada namanya politik". Kemudian Galnoor juga mengatakan bahwa " dengan tidak adanya komunikasi, tidak akan ada upaya yang dibangun secara bersama, sehingga tidak akan ada politik". Secara lebih lanjut, beberapa beberapa ilmuwan politik yang merupakan murid dari Lasswell yaitu Gabriel A. Almond Pool (1917-1984) mengatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan berjalannya semua fungsi dalam politik. Oleh karena itu, ia mengemukakan bahwa dengan proses komunikasi yang baik dan lancar maka akan melahirkan sistem politik yang memiliki kualitas responsif terhadap kepentingan serta aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat(Hafied Cangara 2009).

Dalam proses berlangsungnya suatu komunikasi, terdapat beberapa unsur yang menjadi pendukung terlaksananya suatu proses komunikasi, yaitu :

1. Komunikator atau pemberi pesan

Sebagai pihak yang memberikan atau membuat informasi. Kemudian dalam proses komunikasi tersebut, sumber dapat berupa satu orang atau lebih misalnya suatu organisasi, partai politik, dan pemerintah. Selanjutnya, menurut Dan Noor (1989) dalam (Riswandi 2009) mengkategorikan komunikator kedalam 3 kategori, yaitu : (a) politisi, merupakan orang yang memiliki wewenang dalam suatu lembaga pemerintahan dan memiliki tugas utama dalam kegiatan politik. (b) professional, merupakan seseorang yang mencari penghasilan dengan menjadi komunikator baik dalam konteks politik maupun non politik. (c) aktivis, merupakan seseorang yang bertindak selaku saluran organisasional yang memberikan informasi terkait politik kepada masyarakat umum seperti media massa, partai politik, dan aparata pemerintah atau birokrasi.

2. Pesan

Merupakan segala sesuatu yang diberikan dari komunikator kepada penerima. Ada beberapa cara untuk menyampaikan pesan diantara dapat dilakukan secara langsung atau *face to face* dan dapat dilakukan melalui media sosial. Kemudian, menurut David V.J Bell dalam (Riswandi 2009) membagi 4 jenis pesan yang memiliki makna politik, yaitu : (a) pesan yang mengandung makna kekuasaan, merupakan suatu proses pemberian pesan seseorang atau lebih yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. (b) pesan yang mengandung makna pengaruh, misalnya dapat berupa permintaan, nasehat, dan peringatan. (c) pembicaraan otoritas, merupakan orang yang memiliki wewenang atau otoritas sebagai penguasa sah misalnya tokoh agama dan tokoh adat. (d) pembicaraan konflik, merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator untuk menyelesaikan suatu permasalahan politik.

3. Penerima Informasi

Merupakan pihak yang mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui suatu saluran,

4. Saluran

Merupakan alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan dan saluran ini dapat berupa media cetak serta media

elektronik. Kemudian saluran komunikasi politik dibagi menjadi 3 jenis saluran yaitu : (a) saluran komunikasi massa, dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung atau tatap muka dan dapat dilakukan dengan menggunakan internet sebagai alat untuk menyampaikan pesan. (b) saluran komunikasi interpersonal, merupakan saluran komunikasi yang dilakukan antar pribadi dengan sesama pribadi yang lainnya. (c) saluran komunikasi organisasi, merupakan komunikasi politik yang menggabungkan sifat-sifat saluran antar pribadi dan saluran massa (Riswandi 2009).

5. Tanggapan atau *feedback*

Meupakan suatu reaksi yang diberikan oleh komunikan atas pemberian informasi yang diberikan oleh komunikator melalui suatu saluran. (Indrawan 2018).

Menyer Mc Nair (2003) dan Goran Hedebro (1982), mengemukakan bahwa komunikasi politik dianggap sebagai disiplin ilmu memiliki beberapa fungsi secara mendasar seperti : menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait upaya yang sedang dilakukan oleh lembaga politik dan pemerintah, melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait program, kebijakan serta tujuan lembaga politik, menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk menampung ide-ide yang dapat dijadikan sebagai masukan, mendidik masyarakat melalui pemberian informasi serta sosialisasi terkait tata cara pemilihan umum dan penggunaan hak politik, dan memberikan motivasi kepada fungsionaris politisi serta para pendukung suatu partai. Dengan demikian, komunikasi politik diharapkan mampu memberikan dampak kepada terciptanya pemahaman terkait sistem pemerintahan dan partai politik yang muaranya pada pemenuhan hak politik masyarakat dalam pemilihan umum (Hafied Cangara 2009).

3. Pendidikan Politik

Sebagai bentuk pengenalan dasar mengenai pendidikan politik, terdapat 2 makna yang saling berkaitan dengan terdiri dari kata "pendidikan" dan "politik". Keduanya perlu pengelaborasi mengenai pengertian pendidikan politik dan diperlukan pendefinisian secara formal terkait dengan kedua kalimat tersebut. Secara etimologis, kata "pendidikan" berasal dari bahasa latin yaitu *educare* yang diartikan melatih. Kata "politik" dapat dimaknai dengan suatu aktivitas yang tercipta pada suatu negara dengan cara menggerakkan sistem pemerintahan dan memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. Kemudian menurut Aristoteles, pendidikan politik merupakan

upaya yang dilakukan untuk mendayagunakan kapasitas seseorang dengan tujuan untuk menciptakan pribadi yang aktif dalam kehidupan sosial melalui interaksi politik bersama orang lain (Saptadi et al. 2024).

Menurut Miriam Budiarjo dalam (Saptadi et al. 2024) pendidikan politik merupakan konsep yang didalamnya terdapat serangkaian proses pembelajaran dan kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan sikap politik rakyat negara. Kemudian Sastrawati (2021) mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan dengan memberikan edukasi secara terstruktur sehingga dapat menciptakan karakter pribadi yang dapat memenuhi kualitas secara moral dan etis dan dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, pendidikan politik dapat dimaknai dengan sarana yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan edukasi politik sehingga diharapkan masyarakat dapat memberikan peranan serta berpartisipasi secara aktif pada ranah politik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dijelaskan bahwa "*Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*". Maka dari itu, dengan diselenggarakannya pendidikan politik diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran akan peranan yang dimiliki dan mencingkatnya angka partisipasi masyarakat dalam politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira dalam (Firmansyah Noor Affandi, Tri Suilistyaningsih 2019) pendidikan politik merupakan aktifitas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan karakter dan memunculkan orientasi politik pada pribadi masyarakat. Selain itu, pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat memberikan partisipasinya dalam sistem politik yang sesuai dengan paham sistem demokrasi.

Kata "politik" dapat dimaknai dengan suatu aktivitas atau kegiatan, proses, dan perilaku yang didalamnya terdapat unsur kekuasaan untuk menentukan suatu peraturan dan keputusan yang sah serta dapat berlaku pada masyarakat. Keberadaan peraturan serta keputusan tersebut, dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat diimplemtasikan kepada masyarakat yang memiliki kebinekaan atau keberagaman, ketegangan, perbedaan, dan konflik. Kemudian, keberagaman serta kemajemukan sosial

yang bervariasi perlu dilaksanakannya tata tertib dengan dilandasi kepentingan yang berbeda-beda. Maka dari itu, menurut Kartini Kartono politik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah serta penerapan kekuasaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Kartono 1989).

Kemudian bagian pendidikan pada pendidikan politik pada hakekatnya merupakan Kegiatan pendidikan yang dilakukan secara sengaja dengan mendidik diri sendiri dan dilakukan secara konsisten pada setiap individu, sehingga setiap individu tersebut mampu memahami dirinya sendiri serta kondisi lingkungan disekitarnya, Selain itu, diharapkan mampu untuk melihat suatu kondisi secara kritis, yang selanjutnya dapat memutuskan dalam pengambilan sikap serta serangkaian upaya dalam melakukan penanganan permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Dalam konteks pendidikan politik, setiap individu perlu melihat suatu permasalahan sosial dan politik yang terjadi dengan kritis yang kemudian melakukan diskusi, ikut serta dalam merencanakan penyelesaian permasalahan, dan ikut dalam memecahkan atau menangani permasalahan dengan cara alternatif (Kartono 1989).

Dengan demikian, menurut (Kartono 1989) pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya dianggap sebagai suatu proses penambahan pengetahuan serta informasi mengenai politik saja. Melainkan pendidikan politik memfokuskan terhadap pelatihan kemampuan diri sendiri dalam melihat suatu permasalahan sosial dan politik secara lebih kritis, pengambilan keputusan yang benar, dan melatih diri sendiri dalam bertindak pada permasalahan tersebut. Pada hakekatnya keberadaan setiap individu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan individu lainnya dan didalam nya memiliki keterikatan serta terdapat perbedaan diantaranya. Maka dari itu, untuk mewujudkan kerukunan antar individu diperlukan adanya pelaksanaan pendidikan politik.

Kemudian, menurut Kartono Kartini mengatakan bahwa pendidikan politik memiliki beberapa tujuan, seperti : (a) Membantu masyarakat untuk memahami kondisi sosial politik yang rawan akan konflik, pembentukan karakter masyarakat yang berani untuk memberikan kritik yang membangun terhadap kondisi politik. (b) Mampu untuk menyadarkan masyarakat sebagai warganegara akan peranan dari setiap individu serta agar masyarakat mampu berperan aktif dalam setiap proses politik sehingga mampu mewujudkan pembangunan bangsa dan negara (Kartono 1989).

Menurut Miriam Budiarjo dalam (Saptadi et al. 2024) mengatakan bahwa pemaknaan mengenai pendidikan politik, tidak hanya dipahami sebagai pemahaman terkait proses pemilihan umum dan struktur pemerintahan saja. Melainkan pendidikan politik mencakup pemahaman secara mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, dan mekanisme partisipasi politik. Maka dari itu, menurutnya pendidikan politik memiliki beberapa tujuan seperti membentuk pribadi masyarakat yang dapat memahami secara mendalam prinsip-prinsip dasar politik.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, perlu adanya penggunaan model pendidikan politik yang digunakan untuk mengimplementasikan, merancang, dan mengevaluasi sebagai rencana terstruktur. Hal tersebut juga serah dengan pendapat yang disampaikan oleh Muchlisin Riadi (2020) dalam (Saptadi et al. 2024) yang mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta anggota masyarakat secara sistematis, terencana, dan dialogis dengan tujuan untuk memahami berbagai nilai-nilai, konsep, dan norma politik dari generasi kepada generasi selanjutnya. Dalam model pendidikan politik tersebut, mencakup metode pengajaran, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan pendidikan politik. Terdapat beberapa model pendidikan politik, seperti :

1. Model Keterampilan Hidup (*Life Skills Model*)

Dalam Model ini, berpusat kepada keterampilan hidup kritis yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan komunikasi efektif, berpikir kritis, dan penyelesaian permasalahan.

2. Model Kritis-Partisipatif (*Critical-Participatory Model*)

Pada model ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partisipan secara kritis terkait sistem politik dan sosial. Dalam model ini, berfokus pada partisipasi secara aktif yang dalam kegiatan politik, seperti simulasi pemilihan dan debat.

3. Model Pengalaman Langsung (*Experiential Learning Model*)

Dalam model ini, berfokus kepada proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui pengalaman secara langsung, seperti melaksanakan kunjungan kepada lembaga politik serta berpartisipasi dalam kampanye sosial dengan tujuan untuk memahami secara praktis terkait proses kerja politik.

4. Model Permainan Peran (*Role Playing Model*)

Dalam model ini, dapat dilakukan dengan melibatkan partisipan pada simulasi politik, yang dimana dapat mengambil peranan sebagai pemimpin pemerintah, anggota parlemen, dan pemilih dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait konsekuensi dalam memberikan keputusan politik serta dinamika politik.

5. Model Dialog dan Diskusi (*Dialogical Discussion Model*)

Pada model ini, dapat dilaksanakan dengan melakukan diskusi serta dialog terbuka diantara partisipan dengan partisipan maupun dengan pemberi materi. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan pemahaman secara mendalam, terkait berbagai perspektif politik dan sosial

6. Model Literasi Media dan Informasi

Dalam model ini, berpusat kepada pengajaran keterampilan literasi melalui media untuk membantu partisipan dalam menganalisis terkait informasi-informasi politik dengan politik dengan bijak sehingga para partisipan dapat mengidentifikasi informasi atau berita *hoax*.

7. Model Berbasis Proyek (*Project Based Model*)

Mengikutsertakan partisipan dalam proyek-proyek yang erat kaitannya dengan isu sosial atau politik yang terjadi dalam masyarakat sehingga diharapkan para partisipan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki pada konteks nyata.

8. Model Online dan *E-Learning*

Dalam model ini, para partisipan diberikan materi-materi pendidikan terkait politik melalui *platform online* sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel secara mandiri.

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'ood (1986) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk membentuk nilai-nilai politik sehingga dapat memicu kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk dapat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kemudian dalam proses pelaksanaan pendidikan politik melalui sosialisasi tersebut, menurut Kavang (1998) terbagi menjadi beberapa jenis, seperti : (a) proses dan bentuk yang bersifat tersembunyi atau latin, pada jenis yang pertama ini dapat dicirikan dengan adanya kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga non politis seperti lingkungan sosial,

lingkungan keluarga, dan lingkungan kerja. (b) Proses dan bentuk yang bersifat terbuka, pada jenis yang kedua ini dapat dicirikan dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada lembaga politis tertentu (Rahman 2018).

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dilandasi atas adanya nilai dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara dijelaskan beberapa tujuan Negara Republik Indonesia, seperti : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut serta dala, pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan. Kemudian jika melihat kepada Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, yang dimana dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan falsafah kehidupan sehingga diperlukan pengendalian nilai-nilai etis bagi setiap masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, berdasarkan adanya kedua landasan yang memuat tujuan kehidupan berbangsa dapat diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik (Saptadi et al. 2024).

Pada hakekatnya, kegiatan politik merupakan kegiatan yang didalamnya mengandung penyelesaian suatu permasalahan dan mempertanyakan konflik-konflik yang terjadi. Maka dari itu, adanya konflik-konflik politik yang terjadi merupakan bagian dari tema pokok pelaksanaan pendidikan politik. Kemudian dalam penentuan tema pokok pendidikan politik, perlu dilakukan penentuan suatu metodik yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan politik dengan akurat serta dapat menyelesaikan konflik yang terjadi (Kartono 1989).

4. Pemilihan Umum

Jika membahas mengenai pemeliharaan umum, perlu dipahami terlebih dahulu konsep demokrasi yang dijadikan sebagai latar belakang pelaksanaan pemilu tersebut. Pada hakikatnya, sistem demokrasi dapat domaknai sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat untuk terlibat dalam menentukan pemimpin dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Joseph A Schumpeter demokrasi merupakan wewenang yang dimiliki oleh rakyat dalam mencapai keputusan politik yang mana setiap Individu berhak untuk memberikan suaranya terkait diterima atau tidaknya para politisi yang berkuasa, dalam proses perwujudan suatu sistem demokrasi dapat dilakukan dengan diselenggarakannya pemilihan umum(Schumpeter 1976).

Dalam UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) Dijelaskan bahwa ”*Kedaulatan negara republik*

Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pelaksanaan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dapat dilaksanakan dengan cara mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh negara yang kemudian dibentuk dalam peraturan perundang-undangan melalui penentuan pemimpin pada pemilu secara langsung yang nantinya akan menduduki lembaga pemerintahan. Pemilu pada konteks UUD 1945 merupakan kegiatan politik yang akan diselenggarakan dalam kehidupan ketatanegaraan dan sebagai wadah untuk menuju kepada pembentukan institusi negara serta menentukan pilihan kepada para pejabat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (Silalahi 2022).

Menurut Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa suatu sistem politik sudah dianggap demokratis apabila para pembuat keputusan yang kolektif dipilih berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, berkala, dan pada suatu sistem politik tersebut para calon memiliki kebebasan untuk bersaing dalam memperoleh suara serta seluruh masyarakat dewasa memiliki hak dalam memberikan suaranya. Dengan diselenggarakannya Pemilu secara demokratis, membuat ruang politik yang dimiliki oleh publik terbuka lebih luas. Menurut Sulastomo mengatakan bahwa melalui Pemilu, suatu negara diyakini dapat menciptakan bangsa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat secara tertib, aman, dan berkelanjutan (Ilham 2015).

Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa *"Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945"*.

Pemilihan umum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang prinsipil. Maka dari itu, dapat dikatakan pelanggaran terhadap HAM jika pemerintah tidak menyelenggarakan pemilu yang dimana hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah guna merealisasikan hak asasi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap rakyat memiliki hak untuk dapat berpartisipasi atau dapat disebut sebagai hak pilih. Hak pilih yang dimiliki oleh rakyat, dapat dibedakan menjadi dua konteks yang berbeda yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif dapat dimaknai dengan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk dapat memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Sedangkan hak

pilih pasif merupakan hak setiap warga negara untuk ikutserta menjadi peserta pemilu maupun pilkada. Setiap Hak pilih, dapat diberikan oleh pemerintah kepada warga negara sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemilu (Silalahi 2022).

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pemilu tersebut perlu dilandasi oleh beberapa asas yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan *"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*. Secara lebih lanjut, beberapa asas tersebut dapat dimaknai sebagai:

1. Langsung, dimaknai sebagai pelaksanaan pemilu yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan memilih salah satu calon sesuai dengan keyakinan hati tanpa adanya perantara.
2. Umum, dapat dimaknai dengan adanya pemilu dapat berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain.
3. Bebas, dapat dimaknai dengan setiap individu berhak untuk memilih salah satu calon dalam pemilu tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan tekanan dari pihak lainnya.
4. Rahasia, dapat dimaknai dengan adanya jaminan bagi para pemilih atas kerahasiaan dalam memberikan suaranya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pemilih.
5. Jujur, dapat dimaknai dengan adanya sikap jujur serta tidak melakukan kecurangan yang dimiliki oleh penyelenggara maupun masyarakat dalam Pemilu.
6. Adil, dapat dimaknai dengan semua pihak yang memiliki keterlibatan harus mendapatkan perlakuan yang sama rata (Wibowo, Wardhana, and Nurgiansih 2022).

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya beberapa asas yang dapat dipatuhi oleh penyelenggara maupun masyarakat dapat menciptakan Pemilu yang berdaulat. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam (Silalahi 2022) mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu perlu diselenggarakan secara lima tahun sekali atau secara berkala disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, adanya pendapat yang dimiliki oleh rakyat dapat berubah karena bersifat dinamis

mengenai kebijakan negara. Kedua, perubahan pendapat yang dimiliki oleh rakyat dari waktu ke waktu dapat disebabkan oleh adanya dinamika faktor eksternal dan internal manusia. Ketiga, perubahan pendapat atau aspirasi dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk serta rakyat dewasa. Keempat, Pemilu yang dilaksanakan secara berkala bertujuan untuk menjamin pergantian pemimpin negara baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Berdasarkan pelaksanaan pemilu secara berkala atau secara lima tahun sekali, pada penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana pendidikan politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Landasan Teori

Jika berbicara mengenai komunikasi politik, sebenarnya terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan komunikasi yang sedang terjadi. Salah satunya ialah teori komunikasi menurut Harold D.Lasswell yang muncul pada setelah terjadinya perang Dunia ke I yaitu pada awal masa perkembangan ilmu komunikasi tepatnya pada tahun 1948. Munculnya teori komunikasi menurut Harold D.Lasswell atau yang sering disebut model komunikasi Lasswell bertujuan untuk memahami bagaimana berlangsungnya proses komunikasi serta melihat bagaimana dampak yang muncul dari adanya komunikasi.

a. Sejarah perkembangan teori komunikasi menurut Harold D. Lasswell

Lahirnya model komunikasi menurut Lasswell tidak bisa dilepaskan dari adanya faktor sosial, politik, dan perkembangan teknologi pada masa setelah perang dunia ke I. Pada masa pasca perang dunia ke I, sedang berlangsung perkembangan yang cukup pesat dalam media massa dan hal tersebut dapat memberikan peran dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dalam model komunikasi tersebut seperti bagaimana komunikasi dapat membentuk opini publik, bagaimana media masa dapat mempengaruhi publik, dan dapat mempengaruhi perubahan sikap masyarakat.

Kemunculan model komunikasi Lasswell pada masa pasca perang dunia ke I juga disebabkan oleh adanya pesan-pesan propaganda yang digunakan oleh beberapa pihak negara seperti negara Prancis, Inggris, Jerman, dan Amerika. Dalam beberapa karya ilmiahnya yang berjudul *Propaganda technique in The World War* menganalisis terkait bagaimana Teknik yang digunakan oleh beberapa negara yang terlibat dalam perang serta menganalisis bagaimana

pesan-pesan yang disampaikan tersebut dapat memberikan pengaruh kepada tindakan dan persepsi para penerima pesan.

b. Model Komunikasi Lasswell

Pada tahun 1948, model komunikasi Lasswell ini dikenal dengan model komunikasi yang memiliki pendekatan sederhana namun komprehensif. Dalam model komunikasi tersebut, Lasswell memberikan lima komponen seperti :

1. *Who?* (siapa?)

Dalam komponen yang pertama ini, dapat dimaknai dengan siapa? Atau dapat dimaknai dengan komunikator yang merupakan peran utama dalam proses komunikasi karena mereka dapat menentukan apa saja isi pesan yang akan disampaikan dan memiliki suatu tujuan atas penyampaian pesan tersebut. Adapun komunikator ini dapat berupa individu atau kelompok yang dapat disampaikan oleh lembaga, tokoh publik, media, atau organisasi.

2. *Says what?* (apa yang disampaikan?)

Dalam komponen kedua, "apa yang disampaikan" dapat dimaknai sebagai apa yang disampaikan oleh komunikator dapat berupa simbol-simbol verbal dan non-verbal. Isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat berupa himbauan, informasi, gagasan, dan ide. Hal tersebut menjadi penting karena dalam model komunikasi Lasswell melihat apa yang disampaikan oleh komunikator serta termasuk bagaimana seorang atau kelompok tersebut mengemas pesan agar lebih efektif.

3. *In which channel?* (melalui saluran apa?)

Dalam komponen ketiga, "melalui saluran apa?" dapat dimaknai dengan saluran atau media apa yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan. Saluran atau media yang dipilih oleh komunikator dalam menyampaikan pesan dapat secara langsung atau secara tidak langsung. Saluran langsung tersebut, dapat dilakukan dengan pemberian pesan oleh komunikator secara *face to face* dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kekeliruan informasi yang disampaikan. Adapun secara tidak langsung, dapat dilakukan oleh komunikator melalui berbagai media seperti melalui radio, saluran

televisi, surat kabar, dan melalui internet.

4. *To whom?* (kepada siapa?)

Dalam komponen keempat, “kepada siapa?” dapat dimaknai sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui suatu media. Penerima pesan ini juga dapat berupa perseorangan atau kelompok yang memiliki karakteristik, pandangan, dan latar belakang yang berbeda.

5. *With what effect?* (dengan dampak apa?)

Dalam komponen kelima sebagai elemen terakhir, ”dengan dampak apa?” dapat dimakanai dengan dampak apa yang timbul dari adanya penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator terhadap komunikan. Dalam model komunikasi Lasswell, hal ini menjadi penting sehingga perlu adanya penekanan dalam memahami bagaimana perubahan yang terjadi baik perubahan terhadap sikap, perilaku, atau pemikiran yang dimiliki oleh komunikan terhadap apa yang telah disampaikan.

Model komunikasi Lasswell dikenal sebagai model komunikasi yang bersifat *linear* yang dimana dalam proses komunikasi pada model ini cenderung satu arah yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator saja. Dalam model komunikasi Lasswell juga tidak hanya melihat suatu proses komunikasi saja, tetapi juga memiliki tujuan dan kekuatan dalam mempengaruhi masyarakat pada pembentukan pemahaman, opini, dan pola perilaku masyarakat. Dampak tersebut, dapat terjadi secara langsung dan secara tidak langsung baik itu pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu isu maupun perubahan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok (Lasswell 1948).

c. Operasionalisasi model komunikasi Lasswell

1. *Who?* (komunikator)

Dalam komponen pertama, penulis akan mengidentifikasi siapa yang menjadi komunikator utama dalam penyampaian pesan. Terutama dalam strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik pada Pemilu tahun 2024.

2. *Says what?* (pesan)

Dalam komponen kedua, penulis akan menganalisis bagaimana pesan yang disampaikan oleh komunikator yaitu Kesbangpol Kota Jakarta Utara terkait dengan penyelenggaraan pendidikan politik pada Pemilu tahun 2024.

3. *In which channel?* (saluran)

Dalam komponen ketiga, penulis akan mengidentifikasi saluran atau media apa yang digunakan oleh komunikator yaitu Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam menyampaikan pesan baik berupa secara langsung atau secara tidak langsung seperti pengadaan kegiatan sosialisasi, surat edar, dan spanduk. Kemudian penulis akan menganalisis efektivitas dari setiap saluran yang digunakan oleh Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada Pemilu tahun 2024.

4. *To whom?* (Kepada siapa?)

Dalam komponen keempat, penulis perlu melihat siapa yang memang dijadikan sasaran utama dalam menerima pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara

5. *With what effect?* (dampak)

Dalam komponen terakhir, penulis akan mengidentifikasi bagaimana dampak yang terjadi setelah adanya penyampaian pesan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara melalui kegiatan pendidikan politik dalam menekankan tingkat partisipasi politik masyarakat.

BAB III
GAMBARAN UMUM KESBANGPOL
KOTA JAKARTA UTARA

A. Kesbangpol Kota Jakarta Utara

1. Gambaran Umum Kesbangpol

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Bakesbangpol memiliki beberapa fungsi pokok, seperti :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pembinaan, pengawasan, dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/ atau antar organisasi lainnya;

- k. Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya;
- l. Pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- m. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- n. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- p. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Kesbangpol Kota Jakarta Utara terletak pada Jalan Yos Sudarso No. 27-29 19, RT 19 / RW 5 Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kantor Kesbangpol Kota Jakarta Utara tepatnya terletak pada gedung Walikota Jakarta Utara Blok P Lantai 8.

2. Susunan Organisasi Kesbangpol



Sumber : <https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/pages/struktur-organisasi>

Gambar 3. 1 Susunan Organisasi Kesbangpol

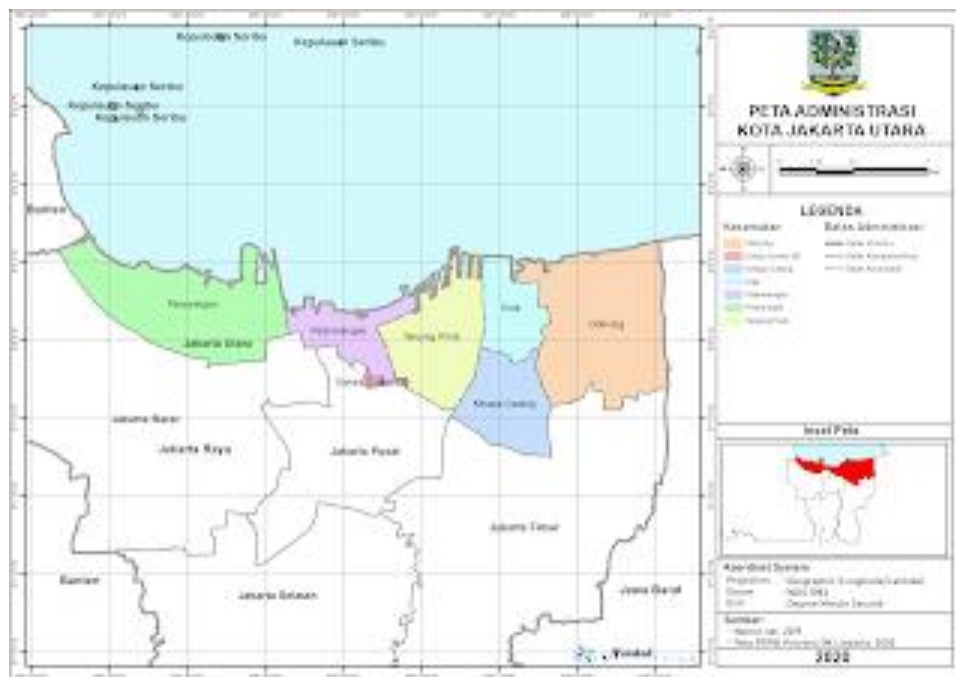
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Utara diketuai oleh Bapak Andi Ahmad Kohar selaku Kepala Suku Badan. Kemudian Kepala Suku Badan membawahi satu subbagian yaitu subbagian tata usaha yang di ketuai oleh Ibu Elida Saragi. Adapun tugas pokok yang dimiliki oleh subbagian tersebut ialah menyelenggarakan serta bertanggung jawab kepada kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian, Kepala Suku Badan juga membawahi tiga sub kelompok yaitu sub kelompok kewaspadaan, sub kelompok ideologi wawasan kebangsaan dan politik, dan sub kelompok ketahanan ekonomi, seni budaya, agama, dan kemasyarakatan. Sub kelompok kewaspadaan diketuai oleh Bapak Sony Tri Wibawa, yang memiliki tugas untuk melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial. Pada sub kelompok ketahanan ekonomi, seni budaya, agama, dan kemasyarakatan diketuai oleh Ibu Rahmi. Selanjutnya, sub kelompok ideologi wawasan kebangsaan dan politik diketuai oleh Ibu Rahmi. Adapun tugas pokok yang dimiliki sub kelompok tersebut ialah membina pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara.

B. Gambaran Umum Kota Jakarta Utara

1. Kondisi Geografi Kota Jakarta Utara

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan bagian dari Kabupaten/kota pada Provinsi DKI Jakarta yang memiliki letak di sebelah utara daratan Jakarta. Adapun posisi letak wilayah Kota Jakarta Utara pada 106°20'00'' Bujur Timur (BT) dan 06°10'00'' Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah sekitar 139.560 Ha. Pada tahun 1966, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara secara resmi diberikan status otonomi khusus sebagai Kota Administrasi yang termasuk kedalam bagian Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sendiri memiliki 6 kecamatan dan 31 kelurahan, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Penjaringan (terdapat 5 kelurahan)
- b. Kecamatan Pademangan (terdapat 3 kelurahan)
- c. Kecamatan Tanjung Priok (terdapat 7 kelurahan)
- d. Kecamatan Koja (terdapat 6 kelurahan)
- e. Kecamatan Cilingcing (terdapat 7 kelurahan)
- f. Kecamatan Kelapa Gading (terdapat 3 kelurahan)



Sumber : <https://neededthing.blogspot.com/2020/11/peta-administrasi-kota-jakarta-utara.html>

Gambar 3. 2 Peta wilayah Kota Jakarta Utara

Wilayah Kota Jakarta Utara memiliki perbatasan pada bagian utara dengan Laut Jawa ($106^{\circ}15'$ BT dan 59° LS) yang dimana hal tersebut menyebabkan adanya suhu cuaca di Kota Jakarta Utara lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta lainnya yaitu rata-rata berada pada 27°C . Pada sisi sebelah selatan, Kota Jakarta Utara berbatasan dengan Kota Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Pada sisi sebelah timur, Kota Jakarta Utara berbatasan dengan Kabupaten Dati II Bekasi. Kemudian pada sisi sebelah barat, Kota Jakarta Utara berbatasan dengan wilayah Jakarta Pusat dan Kota Tangerang.

2. Kondisi Demografi Kota Jakarta Utara

Pada Kota Administrasi Jakarta Utara yang terdiri dari 6 kecamatan dan 31 Kelurahan tersebut, jika dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat sejumlah 1.793.550 penduduk dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
0-4	73.102	73.285	73.653	69.515	69.736	70.148
5-9	71.860	72.678	73.811	67.700	68.444	69.439

10-14	70.466	71.443	72.528	66.883	67.598	68.428
15-19	70.519	71.013	71.539	68.057	68.128	68.146
20-24	72.517	72.621	72.780	71.094	70.694	70.330
25-29	74.521	74.996	75.858	71.490	71.844	72.729
30-34	77.118	78.426	79.787	74.111	75.295	76.443
35-39	76.065	76.465	77.072	74.889	75.136	75.599
40-44	73.022	73.549	73.955	72.179	72.291	72.218
45-49	64.835	64.198	63.608	63.491	62.494	61.552
50-54	54.413	53.270	52.113	53.491	52.206	50.974
55-59	44.237	42.930	41.603	44.496	43.122	41.738
60-64	34.040	32.480	31.074	35.731	34.095	32.600
65-69	24.198	23.017	21.633	25.917	24.618	23.150
70-74	13.841	12.064	10.532	14.968	13.170	11.611
75+	10.821	10.243	9.760	13.963	13.204	12.570
Jakarta Utara	905.575	902.678	903.199	887.975	882.075	877.675

Sumber : <https://jakutkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI5IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>

Tabel 3 1 Jumlah penduduk Kota Jakarta Utara

Jika mengacu Kepada PKPU Pasal 4 Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilu, dijelaskan bahwa “WNI dapat terdaftar sebagai pemilih Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawain, atau sudah pernah kawain”. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diartikan bahwa pada batas usia minimal 17 tahun sudah dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik melalui pelaksanaan pemilihan umum.

C. Ormas Kota Jakarta Utara

Secara umum, masyarakat memiliki hak asasi manusia untuk dapat berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapatnya secara bebas dalam kehidupan berbangsa serta berbangsa namun diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Hal tersebut, sudah dijamin oleh negara dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan ”bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, dan tujuan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan demi terciptanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juga dijelaskan bahwa pendirian suatu organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara

Maka dari itu, negara Indonesia telah menjamin kebebasan masyarakat dalam berorganisasi selama tidak menyalahi UUD dan Pancasila. Kemudian, Kota Jakarta Utara sendiri terdapat sejumlah 103 ormas dan LSM yang tercatat aktif pada Kesbangpol.

BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KESBANGPOL

KOTA JAKARTA UTARA

A. Komunikasi Politik Langsung Kesbangpol Kota Jakarta Utara

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara khususnya divisi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik, dalam proses perencanaan strategi komunikasi politik ditemukan rencana strategis atau disebut Renstra. Dalam rencana tersebut tertuang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program kerja yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan kerja Perangkat daerah atau SKPD termasuk Kesbangpol dan salah satu program kerja yang diajukan pada setiap tahunnya ialah kegiatan pendidikan politik. Selanjutnya, dalam perumusan rencana kerja yang telah disusun oleh pihak Kesbangpol, mendapati adanya beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kesbangpol. Salah satunya ialah peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik dengan kegiatan pendidikan politik yang ditujukan kepada ormas. Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut bertujuan agar ormas dapat memberikan pemahaman serta menjadi teladan terkait kaidah berpolitik yang baik kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif pada proses politik.

Terdapat beberapa upaya dengan melaksanakan beberapa program seperti : program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, dan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penenangan konflik sosial. Adapun pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan melalui beberapa program tersebut diselenggarakan dengan bentuk sosialisasi serta seminar :

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta	Keterangan
1.	Peningkatan kapasitas perempuan dilembaga politik dalam rangka	Hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Balai Yos Sudarso Gedung	1. Tim Penggerak PKK Jakarta Utara 2. Forum	100 orang

	kesetaraan gender	Blok Q Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudarso No 28-29 Tanjung Priok Jakarta Utara	RPTRA Jakarta Utara 3. Perkumpulan Bundo Kandung 4. Minangkabau Jakarta Utara 5. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jakarta Utara 6. BOK Mubaligh Mubalighah Jakarta Utara 7. Nasyiatul Asyiyah Jakarta Utara 8. Muslimat Jakarta Utara	
2.	Peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi	Hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Ruang Fatahilah Blop P Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudaroso No 28-29 tanjung Priok Jakarta Utara	1. SMAN 18 Jakarta 2. SMAN 15 Jakarta 3. SMAN 12 Jakarta 4. SMAN 110 Jakarta 5. SMKN Mandiri 36 Jakarta	100 orang

			6. SMKS Tanjung Priok 7. SMA Yusha Jakarta	
3.	Sosialisasi peningkatan pemahaman Undang-Undang bidang politik	Hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 bertempat di Ruang Fatahilah Blok P Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudaroso No 28-29 tanjung Priok Jakarta Utara	1. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) 2. DPC Gerakan untuk Kesejahteran Tuna Runggu Indonesia (GERKATI) Jakarta Utara 3. Yayasan Peneddikan Laboratorium Pancasila (YPLP	100 orang
4.	Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 bertempat di ruang rapat Suban Kesbangpol Lantai 8 Blok P Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudarso No 28- 29 Kel. Kebon	1. FPK Jakarta Utara 2. Entnis dan Kantor Penghubung	100 orang

		Bawang Tanjung Jakarta Utara	Kec. Priok		
--	--	------------------------------------	---------------	--	--

Sumber : Kesbangpol Kota Jakarta Utara

Tabel 4 1 : Program pendidikan politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara

Jika melihat kepada beberapa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara dilaksanakan sebanyak 9 kali dalam setahun. Kemudian jika rumusan masalah yang diangkat, pendidikan politik yang digunakan sebagai upaya peningkatan partisipasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Kemudian penulis berupaya untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik pada Pemilu Tahun 2024. Setelah penulis melakukan wawancara kepada lembaga terkait, telah ditemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara lebih beragam jika dibandingkan dengan Kesbangpol Kota lainnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Penulis menemukan adanya upaya eksternal dengan berupa menjalin kerjasama bersama pihak lainnya dan upaya internal yang dilakukan oleh lembaga Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam meralisasikan peranan penting pada pendidikan politik.

Dalam melaksanakan peranan penting pada pendidikan politik, Kesbangpol Kota Jakarta telah melaksanakan upaya internal. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertemakan "Peningkatan Pemahaman Bidang Politik". Kegiatan sosialisasi tersebut, diselenggarakan dengan tujuan peningkatan partisipasi masyarakat yang dimana hal tersebut juga sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik melalui sosialisasi juga memiliki fokus lain berdasarkan adanya tingkat keberagaman masyarakat Kota Jakarta Utara. Adapun fokus lainnya yang ditekankan oleh pihak Kesbangpol mencakup stabilitas politik yang dimana dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan beberapa materi terkait pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan pembahsan mengenai Undang-Undang politik.

Kegiatan pendidikan politik tersbut, tdak hanya diberikan oleh Kesbangpol kepada masyarakat saja. Melainkan Kesbangpol Kota Jakarta Utara juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik kepada berbagai organisasi kemasyarakatan dan beberapa sekolahan. Bentuk dari adanya kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan untuk

ormas tersebut juga beragam, mulai dari adanya pengikutsertaan ormas dalam kegiatan politik seperti mengikuti kegiatan yang diselenggarakan dalam posko bersama pemilu pada Pemilu Tahun 2024 dan melaksanakan pendidikan politik kepada beberapa Ormas dengan memberikan pembinaan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara, menggunakan salah satu model yang disampaikan oleh Muchlisin Riadi (2020) dalam (Saptadi et al. 2024) yaitu model dialog dan diskusi. Pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kesbangpol, terdapat adanya pemaparan materi yang merupakan bentuk dari dialog dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab sebagai bentuk diskusi secara terbuka kepada para partisipan yang mengikuti kegiatan tersebut. Dengan demikian, dengan dilakukannya model tersebut dapat memberikan pemahaman secara mendalam, terkait berbagai perspektif politik dan sosial.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah melalui Kesbangpol memiliki tugas serta peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa ruang lingkup fasilitasi pendidikan politik meliputi : konsultasi, koordinasi, penyediaan sarana prasarana, dan materi pendidikan politik. Oleh karena itu, sesuai dengan Pemandagri tersebut Kesbangpol Kota Jakarta Utara juga melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator pada kegiatan pendidikan politik. Pemberian sarana dan prasarana kepada beberapa organisasi kemasyarakatan guna untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Selain itu, Kesbangpol Kota Jakarta Utara juga melaksanakan upaya eksternal dengan diadakannya kerjasama bersama beberapa sekolah yang dimana pihak Kesbangpol dimintai untuk mengisi kegiatan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan sebagai narasumber.

B. Komunikasi Politik Kesbangpol Perspektif Model Komunikasi Lasswell

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dibawakan oleh Harold D. Lasswell yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana strategi komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Dalam model komunikasi Lasswell terdapat lima komponen dalam melihat suatu komunikasi politik dan dampaknya, seperti :

a. *Who?* (siapa?)

Dalam konteks komponen yang pertama, penulis berupaya untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi aktor utama dalam penyampaian pesan terkait dengan kegiatan pendidikan politik. Kemudian penulis menemukan adanya peranan utama yang

memiliki tugas dalam pemberian pesan pendidikan politik ialah bidang Ideologi Wawasan dan Kebangsaan.

Hal tersebut didasarkan atas adanya beberapa tugas dan fungsi pokok yang dimiliki oleh bidang Idewasbangpol seperti : Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang bertujuan untuk pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan, pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan ideologi negara dan pendidikan wawasan kebangsaan, dan pelaksanaan kegiatan koordinasi aparatur pemerintahan kota, organisasi kemasyarakatan , partai politik, lembaga nirlaba lainnya, dan organisasi pers dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara.

Maka dari itu, setelah melakukan identifikasi terhadap beberapa divisi pada Kesbangpol Kota Jakarta Utara. Penulis menentukan bahwasannya bidang Idewasbangpol merupakan komunikator utama dalam kegiatan pendidikan politik berdasarkan peranan pokok yang dimilikinya serta dijadikan sebagai narasumber utama dalam pelaksanaan wawancara penelitian.

b. Says what? (Pesan)

Berdasarkan adanya beberapa upaya pendidikan politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara melalui kegiatan seminar dan sosialisasi, dalam konteks ini penulis berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana pesan yang disampaikan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara dari beberapa upaya yang dilakukan seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada ormas dan kepada beberapa sekolah.

Jika melihat kepada beberapa kegiatan sosialisasi tersebut, telah diberikan beberapa materi pendidikan politik yang didalamnya membahas materi terkait pemberdayaan ormas dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keamanan wilayah, ormas sebagai sarana perastuan dan kesatuan bangsa pasca pemilu 2024, dan materi terkait peran strategi ormas sebagai mitra pemerintah. Kemudian untuk bentuk pesan yang disampaikan Kesbangpol Kota Jakarta Utara kepada SMA 18 Jakarta berbentuk peningkatan etika berbudaya dalam berdemokrasi.

Adapun dalam kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara kepada ormas dan LSM berbentuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui aspirasi masyarakat. Dengan ini ormas dan LSM yang mengikuti kegiatan pendidikan politik diharapkan mampu untuk menjadi jembatan diantara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, pada kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan untuk Sekolah Menengah Atas berbentuk adanya ajakan untuk para

generasi muda dalam mengikuti kegiatan politik seperti berpartisipasi sebagai pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu dan terkait kehidupan berdemokrasi.

c. In which channel? (saluran)

Dalam konteks ini, penulis menemukan adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik melalui saluran media masa yang dimana dalam saluran tersebut terdapat 2 pengkategorian yaitu dilaksanakan secara langsung atau *face to face*. Selain itu, Kesbangpol Jakarta Utara juga menggunakan saluran komunikasi interpersonal.

Adapun upaya pemberian pendidikan politik tersebut, dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan seminar dan sosialisasi secara tatap muka atau *face to face*. Selain itu, dalam konteks saluran komunikasi interpersonal kesbangpol telah bersinergi dan melakukan komunikasi secara intens dengan partai politik dalam menjaga pelaksanaan pemilu yang berdaulat melalui kegiatan khusus kemitraan pemerintahan daerah dengan partai politik.

Selain itu, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara telah melaksanakan pemberian materi pendidikan politik melalui instagram @kesbangpoljakut. Namun, setelah penulis melakukan penelitian terhadap akun tersebut hanya ditemukan postingan-postingan hasil kegiatan atau ucapan hari besar saja. Penulis belum menemukan adanya pemanfaatan media sosial instagram sebagai wadah untuk memberikan materi terkait pendidikan politik oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara. Maka dari itu, berdasarkan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dilakukan secara *face to face* melalui seminar dan sosialisasi.

d. To whom? (kepada siapa?)

Dalam komponen ini, Kesbangpol Kota Jakarta Utara melalui bidang Idewasbangpol telah melakukan pendidikan politik kepada beberapa pihak yang dimana dalam kegiatan tersebut terdapat penyampaian pesan atau himbuan. Kegiatan pendidikan politik tersebut, telah dilaksanakan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara kepada elemen masyarakat, ormas, dan beberapa sekolah.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara selama masa Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pada tanggal 20 Maret tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pendidikan politik yang mengikutsertakan sejumlah 100 orang yang terdiri dari beberapa unsur ormas Kota Jakarta Utara, seperti:

No.	Nama Organisasi Kemasyarakatan
1.	Parmusi
2.	Kembang Latar
3.	LSM GMBI Distrik Jakarta Utara
4.	GIBAS
5.	Wanita Islam Jakarta Utara
6.	FKPPI
7.	BPKRMI
8.	KOMUJU
9.	LSM LAKRI
10.	BANG JAFAR
11.	FORUM Pemuda Betawi Jakarta Utara
12.	North Jakarta (NJ) MANIA
13.	Srikandi Pemuda Pancasila
14.	Orang Indonesia
15.	Karang Taruna Jakarta Utara
16.	KOBAR
17.	Forum Betawi Rempung (FORKABI)
18.	Pemuda Utara
19.	GP ANSOR
20.	Jakarta Pesisir
21.	Ikatan Mahasiswa Muslim Kota (IMMK) Jakarta Utara
22.	Indonesia Anti Narkoba (INSANO)
23.	Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN)
24.	Pemuda Batak Bersatu (PBB)
25.	Perkumpulan Jakarta Utara Rumah Kita (JURK)
26.	Perkumpulan Purna Paskibra Indonesia (PPPI)
27.	LSM Kaliber Indonesia Bersatu Distrik Jakarta Utara
28.	Pengacara dan Jawara Bela Umat (PEJABAT)
29.	Perkumpulan Kader Bela Negara
30.	Perkumpulan Komunitas Alumni Pelajar Jakarta Utara (PERKAPJU)

31.	Gelut Rumah Budaya
32.	Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Utara
33.	Yayasan Sanggar Seni Trotoar
34.	Yayasan Papua Konektivitas PACE
35.	Ikatan Pemuda Indonesia (IPI)
36.	Perkumpulan Perintis Amanah Demokrasi Indonesia (PADI)
37.	Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI)
38.	Barisan Pemuda Generasi Indonesia (BAPPEGESIS)
39.	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
40.	Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB)
41.	Sentra Komunikasi Polri (SENKOM MITRA POLRI) Jakarta Utara
42.	Asosiasi Wartawan Demookrasi Indonesia (AWDI)
43.	Forum Lintas Ormas (FLO) Jakarta Utara
44.	Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau
45.	LSM Perkumpulan Barisan Rakyat (BARAK) Indonesia

Sumber : Kesbangpol Kota Jakarta Utara

Tabel 4 2 Sasaran pendidikan politik gelombang 1

Selanjutnya, Kesbangpol Kota jakarta Utara juga telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik pada tanggal 22 Mei tahun 2024 dengan diikuti sebanyak 100 orang perwakilan dari setiap organisasi kemasyarakatan, seperti sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi Kemasyarakatan
1.	Ketua Pemuda Pancasila Jakarta Utara
2.	Keetua Komando Barisan Rakyat (KOBAR) Jakarta Utara
3.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jakarta Utara
4.	Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara
5.	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Jakarta Utara
6.	Ketua GP Ansor Jakarta Utara

7.	Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jakarta Utara
8.	Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jakarta Utara
9.	Ketua BANG JAPAR
10.	Ketua Karang Taruna Jakarta Utara
11.	Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta Utara
12.	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Utara
13.	Ketua PERSADA Jakarta Utara
14.	Ketua Mitra PMI Jakarta Utara
15.	Ketua GOTARA
16.	Ketua FKDM Jakarta Utara
17.	Ketua Perhimpunana Donor Darah indonesia (PDDI) Jakarta Utara
18.	Ketua Pemuda Utara Jakarta Utara
19.	Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Utara
20.	Ketua Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Utara
21.	Ketua HMI Cabang Pusat Utara
22.	Ketua kesejahteraan Insani Utama (KIU)

Sumber : Kesbangpol Kota Jakarta Utara

Tabel 4 3 Sasaran pendidikan politik gelombang 2

Beberapa ormas dan LSM yang dijadikan sebagai partisipan dalam kegiatan pendidikan politik tersebut, secara umum dijadikan sebagai perantara oleh pemerintah untuk dapat menyampaikan informasi politik atau materi politik yang sudah disampaikan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara. Adapun beberapa ormas dan LSM tersebut, berasal dari *background* yang beragam. Terdapat ormas yang bergerak pada bidang kebangsaan seperti LSM Laskar NKRI, karang taruna Jakarta Utara, perkumpulan kader bela negara, dan forum lintas ormas. Pada ormas yang dilatarbelakangi bidang keagamaan seperti wanita islam Jakarta Utara, Ikatan

Mahasiswa Muslim Kota (IMMK) Jakarta Utara, dan GP Ansor Jakarta Utara. Kemudian pada bidang kesenian seperti Yayasan Sanggar Seni Trotoar, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI).

Jika melihat kepada jumlah seluruh ormas yang ada di Kota Jakarta Utara, dengan para partisipan pada kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol masih berbanding cukup jauh. Hal tersebut tentu saja menjadi pertanyaan tersendiri bagi penulis, bagaimana cara pihak Kesbangpol dalam menentukan partisipan dalam kegiatan pendidikan politik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara mengatakan :

“Pemilihan partisipan pada kegiatan tersebut dipilih secara acak oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara”. (Wawancara, Kesbangpol, Ibu Rahmi)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada LSM Laskar NKRI mengatakan :

”Saya pernah mendapatkan keluhan dari beberapa ormas atau LSM, bahwa mereka sebenarnya ingin diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan politik tersebut. Namun, jika dilihat dari setiap kegiatan hanya itu-itu saja yang mengikutinya”. (Wawancara, LSM Laskar NKRI, Bapak Hendriko)

Berdasarkan adanya penjelasan yang diberikan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara dan LSM Laskar NKRI tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam penentuan partisipan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara belum diberikan secara merata kepada ormas lainnya yang memang belum ikutserta dalam kegiatan pendidikan politik tersebut.

e. *With what effect?* (dampak)

Dalam melihat suatu keberhasilan kegiatan pendidikan politik melalui seminar dan sosialisasi, pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara memiliki tolak ukur yang dijadikan sebagai indikator. Pada setiap kegiatan seminar dan sosialisasi yang dilaksanakan, kesbangpol melakukan pengukuran pemahaman materi yang disampaikan oleh pemateri dengan memberikan *pre-test* dan *post test*.

Selain itu, sejalan dengan (Saptadi et al. 2024) yang menyampaikan bahwa terdapat beberapa model pendidikan politik yang diantaranya yaitu model dialog dan diskusi (*dialogical discussion model*) dimana dilaksanakan dengan melakukan diskusi serta dialog terbuka diantara partisipan dengan partisipan maupun dengan pemberi materi.

Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan pemahaman secara mendala, terkait berbagai perspektif politik dan sosial. Pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara juga melihat suatu keberhasilan kegiatan pendidikan politik dengan tingkat partisipasi masyarakat atau peserta kegiatan dengan beberapa bentuk seperti ikut serta dalam rapat, aktif berdiskusi dengan menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB V
DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK KESBANGPOL
KOTA JAKARTA UTARA

Dalam pembahasan Bab V yang memiliki tujuan untuk menanggapi pertanyaan pertama dalam penelitian, terkait dengan bagaimana dampak dari kegiatan pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi masyarakat atau ormas pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dapat menyebabkan peningkatan partisipasi baik dalam tahapan pengambilan suara, maupun pada kegiatan politik lainnya. Pada kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol, lebih ditujukan kepada beberapa ormas yang ada di Kota Jakarta Utara. Maka dari itu, penulis akan membahas mengenai dampak pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi ormas Kota Jakarta Utara pada kegiatan politik.

Jika melihat kepada studi terkait partisipasi politik, pada awalnya memfokuskan terhadap partai politik yang dijadikan sebagai aktor utama, namun seiring dengan bertumbuhnya demokrasi mulai banyak bermunculan kelompok-kelompok sosial yang memiliki keinginan untuk dapat mempengaruhi suatu proses pembuatan keputusan. Kelompok-kelompok tersebut mulai muncul pada masa pasca industrial (*post industrial*) dan sering disebut sebagai gerakan sosial baru (*new social movement*). Lahirnya kelompok-kelompok tersebut disebabkan oleh adanya kekecewaan atas kinerja partai politik yang cenderung memfokuskan perhatiannya terhadap satu masalah tertentu (*single issue*) yang harapannya dapat lebih efektif dalam suatu proses pengambilan Keputusan (Budiarjo 2008).

Kesbangpol Kota Jakarta Utara merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki peranan penting dalam pendidikan politik. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 5 Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara oleh ibu Rahmi selaku Ketua sub kelompok Idewasbangpol yang mengatakan bahwa :

”Kesbangpol Kota Jakarta Utara sendiri telah melakukan beberapa bentuk upaya pendidikan politik kepada para ormas dengan bentuk sosialisasi dan pengikutsertaan para ormas pada kegiatan politik dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait beberapa proses politik”. (Wawancara, Kesbangpol, Ibu Rahmi)

Kemudian, hal tersebut sejalan berdasarkan keterangan dari salah satu pihak ormas yang merupakan sasaran pada kegiatan pendidikan politik, ketua umum ormas Perkumpulan

Komunitas Alumni Pelajar Jakarta Utara (PERKABJU) mengatakan bahwa :

”Sejauh ini, pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol dengan mengikutseratakan beberapa ormas dilakukan dengan cara memberikan motivasi, himbauan, serta dukungan berupa kegiatan seminar atau sosialisasi. Selain itu, Kesbangpol juga telah meingkutsertakan beberapa ormas tersebut dalam kegiatan politik seperti rapat umum”. (Wawancara, PERKAPJU, Bapak Agustono)

Maka dari itu, berdasarkan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik memberikan beberapa dampak seperti sebagai berikut :

A. Dampak Pendidikan Politik terhadap Kesadarah Politik

Jika melihat kepada pendidikan politik atau dapat disebut sebagai *political forming* atau *polistische Bildung*. Penggunaan kata ”forming” dikarenakan memuat makna untuk membentuk pribadi politik yang memiliki kesadaran akan kedudukan/status politik yangn dimilikinya . Kemudian, terdapat kata ”Bildung” dikarenakan terdapat makna (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), dalam istilah tersebut terdapat aktivitas untuk membentuk diri sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran politik. Pendidikan politik juga disebut sebagai bagian dari pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses pendidikan yang dijalnai, tidak menekankan pada individu yang harus bekerja dalam ranah politik. Pendidikan dewasa yang ditekankan lebih mengarah kepada rekasi individu kepada individu yang lainnya dan individu kepada masyarakatnya yang memiliki konteks sosial serta politik (Kartono 1989).

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh kesbangpol Kota Jakarta Utara tidak semata-mata sebatas memberikan pemahaman saja kepada masyarakat, melainkan dengan diselenggarakan pendidikan politik tersebut dapat memberikan dampak mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan LSM Laskar NKRI mengatakan bahwa :

” Kemarin sempat ada dua timses dari dua calon yang berbeda memintai tolong kepada kami untuk dapat mengorganisir masyarakat agar memilih mereka. Namun, kami secara tegas untuk menolak hal tersebut”. (Wawancara, LSM Laskar NKRI, Bapak Hendriko)

Pada konteks tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan LSM dan Ormas merupakan suatu organisasi

masyarakat non pemerintahan yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan keberdayaan masyarakat. Maka dari itu, LSM serta ormas memiliki peranan yang diberikan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa sebagai wadah perantara yang digunakan oleh pemerintah khususnya Kesbangpol untuk menyalurkan informasi terkait politik kepada masyarakat harus didasari atas aspek kenetralan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ketua umum Perkumpulan Komunitas Alumni Pelajar Jakarta Utara (PERKABJU) mengatakan :

”Kita menyadari bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban dalam pemilu untuk tidak golput”. (Wawancara, PERKABJU, Bapak Agustono)

Jika melihat kepada upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik, program tersebut tidak hanya menasar kepada lapisan masyarakat saja. Melainkan kegiatan tersebut juga menasar kepada beberapa Sekolah Menengah Atas yang ada pada Kota Jakarta Utara. Untuk melihat bagaimana dampak kegiatan pendidikan politik itu sendiri, penulis juga mewawancarai pihak sekolah dengan siswa SMA 18 Jakarta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik yang mengatakan bahwa :

”Sebelumnya saya kurang tertarik dengan ranah politik, namun setelah kegiatan tersebut setidaknya saya mengetahui bagaimana kewajiban saya sebagai pemilih”.(Wawancara, siswa SMA 18 Jakarta, Zaki Amir)

Pada pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan kepada beberapa SMA di Kota Jakarta Utara, membahas secara umum bagaimana kewajiban seorang pemilih dalam pelaksanaan pemilu dan budaya politik dalam berdemokrasi. Salah satu ciri khas negara demokrasi ditandai dengan adanya kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan penyampaian materi, dapat memberikan dampak secara tidak langsung kepada siswa-siswi SMA 18 Jakarta Utara dengan bentuk keaktifan siswa dalam memberikan pendapatnya pada proses pembelajaran di kelas.

Dengan demikian, upaya yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara

dapat memberikan dampak yang baik kepada beberapa partisipan dalam program pendidikan politik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada para partisipan termasuk ormas, LSM dan Sekolah Menengah Atas telah ditemukan adanya bentuk kesadaran politik yang dimiliki oleh mereka. Berdasarkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara, jika dilihat kepada hasil temuan lapangan bahwa para ormas atau LSM tersebut dapat membentuk karakter individu yang sadar akan hak dan kewajibannya kepada pemerintah maupun masyarakat. Tidak hanya sebatas pemahaman materi saja, mereka dapat mengetahui bagaimana seharusnya dalam bertindak ketika ada suatu gejolak politik khususnya dalam pemilu.

Setelah diselenggarakannya pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pihak ormas biasanya melakukan beberapa hal yang sesuai dengan apa yang di sampaikan ketua umum Perkumpulan Komunitas Alumni Pelajar Jakarta Utara (PERKABJU) :

”Biasanya setelah mengikuti kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol, kami langsung untuk segera mengumpulkan pimpinan-pimpinan kemudian selanjutnya akan disebarkan kepada para teman-teman keanggotaan, biasanya dapat dilakukan secara laing atau melalui grup WA yang membahas terkait dengan materi yang disampaikan”. (Wawancara, PERKAPJU, Bapak Agustono)

Selain itu, sama hal nya dengan apa yang disampaikan oleh bapak Agustono, bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada LSM Laskar NKRI mengatakan :

”biasanya setelah pelaksanaan pendidikan politik, kami selalu melakukan rapat evaluasi internal untuk menyampaikan materi kepada para anggota”. (Wawancara, LSM Laskar NKRI, Bapak Hendriko)

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh para pimpinan ormas dengan memberikan informasi baik berupa materi maupun himbaun oleh pihak Kesbangpol kepada para anggota lainnya merupakan bentuk kesadaran politik yang muncul setelah dilaksanakan pendidikan politik. Hal tersebut merupakan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang pemimpin dalam menyampaikan informasi atau materi politik kepada para anggotanya Selanjutnya, Miriam budiarjo mengatakan bahwa kesadaran politik memiliki kaitan yang erat dengan partisipasi politik yang dimana jika tingkat partisipasi rendah maka terdapat pertanda bahwa banyak masyarakat yang tidak memberikan

perhatiannya kepada masalah kenegaraan (Budiarjo 2008).

B. Dampak Pendidikan Politik terhadap Peningkatan Partisipasi Kegiatan Politik

Pada konteks sistem negara demokratis, unsur partisipasi politik merupakan salah satu hal penting dalam menjaga ketahanan serta keutuhan sistem tersebut. Adanya peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat juga dapat disebabkan oleh adanya peningkatan kesadaran politik yang dimiliki, mereka menyadari bagaimana suatu pembuatan keputusan yang dibuat serta diimplementasikan oleh pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan warga negara kedepannya. Jika membahas mengenai partisipasi politik, secara umum dapat dilihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, partisipasi politik juga dapat beragam bentuknya.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) dalam (Afdhal 2022) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh warga negara yang bertindak secara perseorangan atau kelompok dalam ranah politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki sifat terorganisir atau spontan, kolektif atau individual, illegal atau legal, efektif atau tidak efektif. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa suatu partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti sebagai berikut

- a. Dalam kegiatan pemilihan umum, bukan hanya terkait pemberian suara oleh masyarakat melainkan juga pada proses-proses tahapan yang ada pada sebelum pelaksanaan pemilihan umum
- b. Melaksanakan pendekatan atau *lobbying* baik secara perseorangan atau kelompok kepada pimpinan politik dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
- c. Aktivitas organisasi yang ada kaitannya dengan partisipasi sebagai pejabat atau anggota dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah
- d. Memperoleh koneksi atau *contacting* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada para petinggi politik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan segelintir orang
- e. Perbuatan kekerasan atau *violence* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara yang anarkis sehingga dapat

memberikan dampak signifikan dalam lingkungan masyarakat serta bertujuan untuk memberikan tekanan secara langsung kepada pemerintah dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan kedepannya.

Kemudian berdasarkan beberapa bentuk partisipasi tersebut, penulis mendapati adanya partisipasi yang telah dilakukan oleh lapisan ormas sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Rahmi selaku ketua sub kelompok Idewasbangpol mengatakan bahwa :

”bentuk peningkatan partisipasi yang dirasakan selama ini dilihat dari adanya keikutsertaan ormas dalam posko bersama pemilu yang didalamnya memuat beberapa proses persiapan pemilu dan menghadiri kegiatan rapat”,

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan LSM Laskar NKRI mengatakan bahwa :

”Pada setiap 3 kali dalam seminggu, kami mengadakan kunjungan kepada masyarakat untuk memberikan informasi politik yang telah disampaikan oleh Kesbangpol melalui pendidikan politik”(Wawancara, LSM Laskar NKRI, Bapak Hendriko)

Berdasarkan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai penyalur informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat, LSM Laskar NKRI memiliki program control social yang diadakan selama 3 kali dalam seminggu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi, materi yang berkaitan politik, dan bagaimana penyikapan suatu fenomena politik yang terjadi kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang selanjutnya dapat disampaikan kepada Kesbangpol Kota Jakarta Utara. Selain itu, jika melihat kepada jumlah partisipasi kegiatan politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara diikuti oleh sejumlah 45 ormas. Selanjutnya dalam kegiatan politik seperti deklarasi damai pada Pemilu tahun 2024 yang didalamnya terdapat 89 partisipan dari berbagai ormas. Kemudian jika dilihat dari kedua hal tersebut, menjelaskan bahwa terjadi peningkatan partisipan dalam kegiatan pertama dan kegiatan kedua yang telah diselenggarakan oleh pihak Kesbangpol Kota Jakarta Utara.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, mengenai strategi komunikasi politik Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Strategi komunikasi politik Kesbangpol diawali dengan adanya tahap perencanaan melalui renstra dengan merumuskan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan kepada beberapa lapisan seperti ormas, LSM, dan beberapa Sekolah Menengah Atas di Kota Jakarta Utara. Strategi komunikasi politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara telah melakukan upaya pendidikan politik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikutserta pada kegiatan politik melalui kegiatan seminar dan sosialisasi. Pada kegiatan tersebut, Kesbangpol menyampaikan beberapa materi terkait pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan diselenggarakannya kegiatan pendidikan politik kepada ormas atau LSM dapat memberikan teladan bagi masyarakat tentang sebagaimana mestinya menjalankan hak dan kewajiban dalam politik.

Kedua, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa dampak dari kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dapat berdampak kepada adanya peningkatan kesadaran yang dimiliki oleh para LSM atau Ormas akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat Indonesia dengan memberikan suaranya pada pelaksanaan pemilu. Kemudian untuk tingkat SMA, kesadaran politik yang dimiliki berbentuk keaktifan siswa pada proses pembelajaran sebagai wujud sistem demokrasi dalam menyampaikan pendapatnya. Selain itu, kegiatan pendidikan politik juga berdampak pada peningkatan partisipasi politik dengan bentuk adanya program social control secara rutin yang dilakukan oleh LSM atau ormas dengan cara turun kepada masyarakat untuk menerima aspirasi dan selanjutnya disampaikan oleh pihak pemerintah dan mengikuti kegiatan persiapan Pemilu dalam posko bersama Pemilu.

Ketiga, berdasarkan adanya beberapa model pendidikan politik yang bermacam-macam, Kesbangpol Kota Jakarta Utara kurang bervariasi dalam menerapkan model pendidikan politik yang dimana hanya menerapkan satu model yaitu model pendidikan

politik dialog dan diskusi. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam penentuan partisipan kurang merata kepada beberapa ormas dan LSM lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran kepada Kesbangpol Kota Jakarta Utara sebagai Komunikator utama dalam menyampaikan pesan politik kepada beberapa lapisan masyarakat :

1. Jika dilihat kepada metode pelaksanaan pendidikan politik Kesbangpol Kota Jakarta Utara dalam menyampaikan pesan, sejauh ini hanya dengan menggunakan metode *face to face*. Maka dari itu, perlu adanya pemaksimalan penggunaan media sosial sebagai media untuk menyampaikan informasi atau materi politik kepada masyarakat sehingga dapat lebih mudah dalam menjangkau seluruh masyarakat dan lebih fleksibel.
2. Dalam penentuan audiensi kegiatan pendidikan politik, Kesbangpol Kota Jakarta Utara perlu menentukan siapa penerima pesan yang seharusnya ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kesbangpol Kota Jakarta Utara juga bisa melakukan pergantian terhadap peserta kegiatan pendidikan politik agar materi atau informasi politik dapat menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Hamdillah. 2022. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Nagari Muaro Paiti, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur."
- Alvin, Silvanus. 2022. "Strategi Komunikasi Politik Caleg PSI Lolos DPRD Kota Bandung Di Pemilu 2019." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (4): 312–23. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i4.1167>.
- Amir Hamzah. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara.
- Anwar, M. 2024. "Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 Di Jakarta Timur Meningkatkan 1,2 Persen." *Sudin Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur*. 2024. <https://timur.jakarta.go.id/berita/15505/partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2024-di-jakarta-timur-meningkat-12-persen>.
- Apriliana, Dhita Dwi. 2023. "Komunikasi Politik Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Tasikmalaya." Universitas Siliwangi.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Cetakan Pe. Jakarta: Rineka Cipta. . 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashariadi, Ilham Agung. 2020. "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Budiana, M. 2022. *Strategi Komunikasi Politik Berbasis Budaya Dalam Sistem Kepartaian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Reserch Design : Choosing Among Five Approaches*. United States of America: Sage Publicaton.
- Fathurrijal, Fathurrijal, Ishanan Ishanan, Yusron Yusron, and Suhadah Suhadah. 2024. "Strategi Komunikasi Politik Kpud Lombok Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024." *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan* 7 (2): 179–96. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.26272>.
- Firmansyah Noor Affandi, Tri Sulistyaningsih, Yana S.Hijri. 2019. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Hafied Cangara. 2009. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, Dan Strategi*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

- Haryanti, Djoko Sumanto dan Amelia. 2021. "Pendidikan Politik." In , edited by Alinurdin dan Ichwani Siti Utami. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Komunikasi Politik Teori Dan Praktik*. Edited by Nunik Siti Nurbaya. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2019. *Komunikasi Politik Dalam Pilkada Langsung : Teori Dan Praktik*. Edited by Nunik Siti Nurbaya. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ilham, Muhadam Labolo dan Teguh. 2015. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep Dan Isu Strategis." In , 1st ed., 282. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indah Pratiwi, Setio Rahayu, dan Triyanto. 2020. "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda" 8 (2): 130–38.
- Indrawan, Efriza dan Jerry. 2018. *Komunikasi Politik Pemahaman Secara Teoritis Dan Empiris*. Edited by Nur Saadah. Cetakan Pe. Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Irmawanti, Irmawanti, La Ode Muhammad Umran, and Abdul Jalil. 2023. "Komunikasi Mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023 Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Pada Pemilu 2024." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 8 (3): 558–70. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i3.78>.
- Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda Juanda. 2023. "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2 (2): 140–47. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Cetakan I. Bandung: CV Mandar Maju.
- Khadavi, Muhammar. 2023. "Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh."
- Khasanah, Fela Uswatun, and Annindya Putri Saraswati. 2024. "Efektivitas Program Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Tengah Dalam Menyambut Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (13): 248–54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12747248>.
- Kristian, Yudhi. 2022. "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitass Politik Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Selatan."
- Lasswell, Harold D. 1948. "The Structure and Function of Communication in Society." *The*

- Communication of Ideas*, no. 1948: 37–52. [http://www.dhpescu.org/media/elip/The structure and function of.pdf](http://www.dhpescu.org/media/elip/The%20structure%20and%20function%20of.pdf).
- Mendrofa, D E K. 2024. “Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula.” ... *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan ...* 2. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/81>.
- Nur Hasanah, Sry Reski Mulka, Hafizh Yudhistira I, Rudini. 2021. “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda.” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 4 (3): 446–52. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11561>.
- Paluvi, M G, O Ofianto, and F F Mulyani. 2024. “Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bungo Pada Pemilu 2024.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8: 26861–67. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15364>.
- Pattiasina, Harold Y. 2015. “Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah Pada Pemilu 2014.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 19 (1): 17–28.
- Prabowo, Kautsar Widya. 2024. “Terjadi Penurunan Angka Partisipasi Warga Jakarta Di Pilpres 2024.” *Metrotvnews*. 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C382M-terjadi-penurunan-angka-partisipasi-warga-jakarta-di-pilpres-2024>.
- Prof. Dr. Conny R.Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Edited by Arita L. Jakarta: PT Grasindo.
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2018. *Komunikasi Politik*. Edited by Mulyono. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahman, Asmika. 2018. “Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula.” *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 44–51.
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*. I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saptadi, Nobertus Tri Suswanto, Agus Holid, Muhammad Reza Firmansyah, Ferdinandus Sampe, Wencislaus Sirjon Nansi, Asridiana, Erni Susilawati, Blasius Perang, and Yuyun Fitriani. 2024. “Pendidikan Politik.” In , edited by Andri cahyo Purnomo, 124. Banten: PT Sada Kurnia Pustala.
- Schumpeter, Joseph A. 1976. *Capitalism, Socialism and Democracy* (London. George Allen.
- Silalahi, Wilma. 2022. *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Edited by Yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sofyan, M. ali, Puji Laksono, and Muhammad Chabibi. 2020. “Strategi Komunikasi Politik Ulama Nahdlatul Wathan Pancor Dalam Membentuk Opini Publik Pilkada Pada Pemilihan

- Umum Presiden Tahun 2019.” *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah Dan Ekonomi)* 5 (2): 57–73.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, CV. . 2013. *Metode Peneliitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sutangga, Jhoni, Kadri Kadri, and Moh Fahri. 2023. “Strategi Komunikasi Politik Elit NU Pada Pilkada Lombok Tengah 2020 (Studi Atas Keterlibatan Elit NU Dalam Tim Pemenangan Paslon Maiq Meres).” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9 (1): 1499–1512. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4771>.
- Syah, Rahmat. 2014. “Peranan Komunikasi Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 Di Kecamatan Besitang.”
- Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, and T Heru Nurgiansih. 2022. “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (2): 3217–25.

LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara

a. Organisasi Masyarakat

No.	Nama Organisasi Kemasyarakatan	Status	Berdiri Sejak	Periode Kepengurusan
1.	Lembaga Sukses Jakarta (LSJ)	Aktif	11 Oktober 2016	2021 – 2026
2.	Komunikasi Transportasi Laut Indonesia (KTLI)	Aktif	20 April 2020	2020 – 2024
3.	Indonesia Anti Narkoba (Insano)	Aktif	18 April 2016	2020 – 2027
4.	Perkumpulan Pengemudi Jakarta Raya (PPJR)	Aktif	31 Desember 2018	2019 – 2024
5.	Barisan Nasional Patriot Sejati Indonesia (BANASPATI)	Aktif	11 Mei 2018	2020 – 2025
6.	Perkumpulan Advokad Indonesia Jakarta Utara (PERADIN)	Aktif	23 Desember 2019	2019 – 2024
7.	Forum Pemuda Betawi	Aktif	4 November 2019	2020 – 2025
8.	Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Utara	Aktif	20 Februari 2017	2019 – 2024
9.	DPC Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) JU	Aktif	9 Juli 2018	2020 – 2025
10.	Pemuda Batak Bersatu (PBB)	Aktif	8 Oktober 2019	2020 – 2025

11.	DPC Perkumpulan Dewan UKM Nusantara	Aktif	30 November 20 2012	2021 – 2024
12.	Perkumpulan Jakarta Utara Rumah Kita (JURK)	Aktif	25 Juni 2021	2021 – 2026
13.	Perkumpulan Purna Paskibraka Indonesia (PPPI)	Aktif	-	-
14.	LSM Kaliber Indonesia Bersatu Distrik Jakarta Utara	Aktif	21 Agustus 2021	2021 – 2026
15.	Jakarta Pesisir	Aktif	12 Juli 2021	2021 – 2024
16.	DPD Lembaga Bantuan Hukum Insan Pecinta Keadilan	Aktif	30 Juli 2017	2021 – 2026
17.	DPC Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten	Aktif	-	2021 – 2026
18.	DPD Ahlulbait	Aktif	-	2020 – 2024
19.	Pengacara dan Jawara Bela umat (PEJABAT)	Aktif	28 November 2019	2021 – 2026
20.	Panguran Jalak Banten Nusantara (PJBN)	Aktif	7 Oktober 2020	2021 – 2026
21.	DPC Lembaga Investigasi Negara	Aktif	-	2021 – 2024
22.	DPW Tim Khusus Anti Begal (TEKAB) Jakarta Utara	Aktif	24 Januari 2018	2021 – 2024
23.	DPD Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI)	Aktif	-	2021 – 2026
24.	DPD Perkumpulan Forum Kader Bela Negara	Aktif	29 November 2019	2022 – 2026

25.	DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal Indonesia	Aktif	26 November 2018	2019 – 2024
26.	PBD Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia	Aktif	17 Mei 2019	2022 – 2027
27.	DPW Perkumpulan Maluku Satu Rasa (M1R) Salam Sarane Indonesia	Aktif	16 Juni 2020	2020 – 2025
28.	Pengurus Pemuda katolik Cabang Jakarta Utara	Aktif	5 Februari 2022	2021 – 2024
29.	Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 84 Jakarta	Aktif	21 Oktober 2020	2020 – 2024
30.	DPP Yayasan Gema Amal Soleh	Aktif	26 Oktober 2021	2021 – 2026
31.	Gelut Rumah Budaya	Aktif	24 Maret 2021	2021 – 2024
32.	Yayasan Sanggar Seni Trotoar	Aktif	18 Juni 2022	2022 – 2026
33.	Perkumpulan IKA”LIBELS JAKARTA	Aktif	24 Maret 2022	2021 – 2024
34.	DPP Yayasan Papua Konektivitas PACE	Aktif	20 Mei 2022	2022 – 2026
35.	Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Indonesia	Aktif	-	2022 – 2025
36.	DPP Ikatan Pemuda Indonesia (IPI)	Aktif	-	2020 – 2025
37.	Perkumpulan Perinis Amanah Demokrasi Indonesia (PADI)	Aktif	5 Januari 2021	2021 – 2025
38.	DPD Cendikia Muda Muslim Indonesia (DPD CMMI) Jakarta	Aktif	-	2022 – 2027

	Utara			
39.	Perkumpulan Professional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN)	Aktif	6 Februari 2022	2022 – 2025
40.	Gerakan Militansi Pejuang Indonesia	Aktif	30 Juli 2022	2022 – 2027
41.	Laskar Sasak	Aktif	23 Juni 2022	2022 – 2024
42.	Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara RI (LPPNRI)	Aktif	18 Agustus 2015	2019 - 2022
43.	Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara	Aktif	6 April 2018	2019 - 2022
44.	Gerakan Muda Nurani Rakyat (GEMURA)	Aktif	1 Juli 2018	2020 - 2022
45.	Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP)	Aktif	11 November 2013	Tidak ditentukan lamanya
46.	Yayasan Generasi Asli Priok (YAGAPRI)	Aktif	-	Tidak ditentukan lamanya
47.	Forum Komunikasi Antar Gereja (FORMAG)	Aktif	21 April 2015	2018 - 2023
48.	Yayasan Ikhsanul Amal Umat (YIAU)	Aktif	26 Februari 2019	Tidak ditentukan lamanya
49.	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama	Aktif	-	2020 – 2022
50.	Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama	Aktif	16 September 2019	2020 - 2022
51.	DPW Gograber Inndonesia	Aktif	3 Desember 2018	2020 - 2023
52.	DPP Perkumpulan Anka Priok Reformasi	Aktif	28 Juni 2021	-

53.	DPW Perkumpulan garda Mencegah dan Mengobati	Aktif	22 Juni 2016	Tidak ditentukan lamanya
54.	LSM Peduli Pembangunan dan Keadilan DPP DKI	Aktif	20 Juli 2005	Tidak ditentukan lamanya
55.	Perkumpulan Komunitas Alumni pelajar jakarta Utara (PERKAPJU)	Aktif	5 Oktober 2021	Tidak ditentukan lamanya
56.	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Punggawa Inspirasi Rakyat	Aktif	17 Oktober 2017	2022 - 2023
57.	Perkumpulan Perduli Nusantara Tunggal	Aktif	17 Juni 2022	2022 - 2023
58.	Barisan Pemuda Generasi Indonesia (BAPEGESIS)	Aktif	20 November 2020	2023 – 2026
59.	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Aktif	-	2022 – 2026
60.	DPC Gerakan indonesia Bersatu Jaya (GRIB)	Aktif	-	2023 – 2027
61.	Yayasan Hidayah Pemersatu Umat Indonesia (HPUI)	Aktif	25 April 2019	2023 – 2026
62.	Pengurus Sentra Komunikasi Mitra Polri (SENKOM MITRA POLRI) Jakarta Utara	Aktif	16 Oktober 2015	2022 – 2027
63.	DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)	Aktif	-	2023 – 2028
64.	DPD Barisan Pemuda Nusantara	Aktif	20 Februari 2017	2020 – 2025

65.	DPD Laskar NKRI	Aktif	26 Maret 2007	2023 – 2025
66.	Forum Lintas Ormas Jakarta Utara	Aktif	20 Februari 2018	2022 – 2027
67.	Yayasan Sanggar Sin Lam Ba Batavia	Aktif	14 Desember 2021	2021 – 2025
68.	Perkumpulan Suporter Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta Utara	Aktif	4 Februari 2023	2022 – 2027
69.	Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau	Aktif	23 Maret 2020	2022 – 2026
70.	Yayasan Pendidikan dan Dakwah Nurul Hadi Al-Labini	Aktif	20 September 2023	2019 – 2024
71.	Perkumpulan Kebudayaan Seni Silat dan Tari Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir	Aktif	28 Desember 2023	2023 – 2028
72.	Perkumpulan Generasi Maju Bersama Jakarta Utara	Aktif	15 Maret 2023	2022 – 2024
73.	Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia	Aktif	1 Agustus 2018	2023 – 2028
74.	Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP POLRI)	Aktif	9 Julio 2021	2022 – 2026
75.	Perkumpulan Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia	Aktif	17 Julli 2017	2022 – 2026
76.	Lembaga Kajian Nasional Kebijakan dan Informasi Publik	Aktif	27 April 2018	2023 – 2028
77.	Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Aktif	23 Februari 2000	2022 – 2027
78.	DPC LSM Perkumpulan Barisan	Aktif	29 Juli 2016	2023 – 2028

	Rakyat Indonesia (LSM BARAK INDONESIA)			
79.	Perkumpulan Masyarakat Laskar Merah Putih	Aktif	15 Oktober 2019	2022 – 2024
80.	Perkumpulan Lembaga Informasi Kasus Nasional	Aktif	9 Agustus 2023	2023 – 2028
81.	DPD Perkumpulan Persatuan Umat Islam (PUI)	Aktif	27 Februari 2020	2021 – 2025
82.	Gereja Kabar Baik Indonesia	Aktif	12 Desember 2022	2022 – 2026
83.	Perkumpulan Forum Komuniasi Madura Bersatu	Aktif	10 Juli 2023	2022 – 2025
84.	Perkumpulan ORSHID SHIDDIQIYYAH	Aktif	12 Mei 2022	2022 – 2027
85.	Perkumpulan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI)	Aktif	23 Januari 2024	2022 – 2027
86.	DPD LSM Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI)	Aktif	25 Februari 2019	2024 – 2029
87.	DPC Perkumpulan Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara (ELKAN)	Aktif	28 Desember 2023	2024 – 2029
88.	Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)	Aktif	3 Februari 2022	2023 – 2028
89.	LSM Harapan Rakyat Indonesia Maju (HARIMAU)	Aktif	1 Februari 2024	2024 – 2028

90.	LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA)	Aktif	1 April 2024	2024 – 2029
91.	Solidaritas Nasional Kebhinnekaan Bersatu (SNKB)	Aktif	30 Januari 2021	2024 – 2029
92.	Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD)	Aktif	-	2024 – 2029
93.	Dewan Harian Cabang (DHC) 45	Aktif	-	2024 – 2029
94.	DPC Ikatan Donor Darah Sukarela (IDDS)	Aktif	-	2024 – 2027
95.	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Aktif	-	2024 – 2027
96.	DPC Madura Asli (MADAS)	Aktif	-	2023 – 2026
97.	DPD Duaempat Bela Bangsa	Aktif	-	2024 – 2026
98.	DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI)	Aktif	-	2024 – 2026
99.	Yayasan Pembina Teater Jakarta Utara	Aktif	22 Oktober 2024	2024 – 2029
100	Persaudaraan Muslim Indonesia (PARMUSI)	Aktif	13 Agustus 2010	2022 – 2027
101	DPC Penulis, Aktivitas dan Pewarta Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (PELITA PRABU)	Aktif	27 Juni 2024	2024 – 2029
102	Perkumpulan Cilincing Bersatu (CIBER)	Aktif	20 Oktober 2017	2020 – 2025
103	Perkumpulan Saudara Setia Hati Terate	Aktif	25 Januari 2022	2020 – 2025

b. Sasaran Pendidikan Politik Gelombang 1

No.	Nama Organisasi Kemasyarakatan
1.	Parmusi
2.	Kembang Latar
3.	LSM GMBI Distrik Jakarta Utara
4.	GIBAS
5.	Wanita Islam Jakarta Utara
6.	FKPPI
7.	BPKRMI
8.	KOMUJU
9.	LSM LAKRI
10.	BANG JAFAR
11.	FORUM Pemuda Betawi Jakarta Utara
12.	North Jakarta (NJ) MANIA
13.	Srikandi Pemuda Pancasila
14.	Orang Indonesia
15.	Karang Taruna Jakarta Utara
16.	KOBAR
17.	Forum Betawi Rempung (FORKABI)
18.	Pemuda Utara
19.	GP ANSOR
20.	Jakarta Pesisir
21.	Ikatan Mahasiswa Muslim Kota (IMMK) Jakarta Utara
22.	Indonesia Anti Narkoba (INSANO)
23.	Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN)
24.	Pemuda Batak Bersatu (PBB)
25.	Perkumpulan Jakarta Utara Rumah Kita (JURK)
26.	Perkumpulan Purna Paskibra Indonesia (PPPI)
27.	LSM Kaliber Indonesia Bersatu Distrik Jakarta Utara

28.	Pengacara dan Jawara Bela Umat (PEJABAT)
29.	Perkumpulan Kader Bela Negara
30.	Perkumpulan Komunitas Alumni Pelajar Jakarta Utara (PERKAPJU)
31.	Gelut Rumah Budaya
32.	Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PAGMNI) Jakarta Utara
33.	Yayasan Sanggar Seni Trotoar
34.	Yayasan Papua Konektivitas PACE
35.	Ikatan Pemuda Indonesia (IPI)
36.	Perkumpulan Perintis Amanah Demokrasi Indonesia (PADI)
37.	Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI)
38.	Barisan Pemuda Generasi Indonesia (BAPPEGESIS)
39.	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
40.	Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB)
41.	Sentra Komunikasi Polri (SENKOM MITRA POLRI) Jakarta Utara
42.	Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)
43.	Forum Lintas Ormas (FLO) Jakarta Utara
44.	Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau
45.	LSM Perkumpulan Barisan Rakyat (BARAK) Indonesia

c. Sasaran Pendidikan Politik gelombang 2

No.	Nama Organisasi Kemasyarakatan
1.	Ketua Pemuda Pancasila Jakarta Utara
2.	Keetua Komando Barisan Rakyat (KOBAR) Jakarta Utara
3.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jakarta Utara
4.	Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara
5.	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Jakarta Utara

6.	Ketua GP Ansor Jakarta Utara
7.	Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) jakarta Utara
8.	Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jakarta Utara
9.	Ketua BANG JAPAR
10.	Ketua Karang Taruna Jakarta Utara
11.	Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta Utara
12.	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Utara
13.	Ketua PERSADA Jakarta Utara
14.	Ketua Mitra PMI Jakarta Utara
15.	Ketua GOTARA
16.	Ketua FKDM Jakarta Utara
17.	Ketua Perhimpunana Donor Darah indonesia (PDDI) Jakarta Utara
18.	Ketua Pemuda Utara Jakarta Utara
19.	Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Utara
20.	Ketua Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Utara
21.	Ketua HMI Cabang Pusat Utara
22.	Ketua kesejahteraan Insani Utama (KIU)

d. Program Pendidikan Politik Kesbangpol Jakarta Utara

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta	Keterangan
1.	Peningkatan kapasitas perempuan dilembaga politik dalam rangka kesetaraan gender	Hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Balai Yos Sudarso Gedung Blok Q Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta	9. Tim Penggerak PKK Jakarta Utara 10. Forum RPTRA Jakarta Utara 11. Perkumpulan Bundo	100 orang

		Utara. Jalan Yos Sudarso No 28-29 Tanjung Priok Jakarta Utara	<p>Kandung</p> <p>12. Minangkabau Jakarta Utara</p> <p>13. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) Jakarta Utara</p> <p>14. BOK Mubalighah Mubalighah Jakarta Utara</p> <p>15. Nasyiatul Asyiyah Jakarta Utara</p> <p>16. Muslimat Jakarta Utara</p>	
2.	Peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi	Hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Ruang Fatahilah Blop P Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudaroso No 28-29 tanjung Priok Jakarta Utara	<p>8. SMAN 18 Jakarta</p> <p>9. SMAN 15 Jakarta</p> <p>10. SMAN 12 Jakarta</p> <p>11. SMAN 110 Jakarta</p> <p>12. SMKN Mandiri 36 Jakarta</p> <p>13. SMKS Tanjung Priok</p> <p>14. SMA Yusha Jakarta</p>	100 ang

3.	Sosialisasi peningkatan pemahaman Undang-Undang bidang politik	Hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 bertempat di Ruang Fatahilah Blok P Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudaroso No 28-29 tanjung Priok Jakarta Utara	4. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) 5. DPC Gerakan untuk Kesejahteran Tuna Runggu Indonesia (GERKATI) Jakarta Utara 6. Yayasan Penddikan Laboratorium Pancasila (YPLP)	100 orang
4.	Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 bertempat di ruang rapat Suban Kesbangpol Lantai 8 Blok P Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudarso No 28- 29 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara	3. FPK Jakarta Utara 4. Entnis dan Kantor Penghubung	100 orang

5.	Peningkatan pemahaman ideologi bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila	Hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 bertempat di balai Yos Sudarso Blok Q Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudarso No 28- 29 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKK Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Forum RPTRA Jakarta Utara 3. Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOM-JU) 4. PMI Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Utara 6. TAGANA Kota Administrasi Jakarta Utara 7. Saka Bakti Husada Kwartir Kota 8. Administrasi Jakarta Utara 9. PPI Kota Administrasi Jakarta Utara 	100 orang
----	--	---	--	-----------

6.	Pemantapan wawasan kebangsaan	Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 bertempat di ruang rapat Suban Kesbangpol Lantai 8 Blok P Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudarso No 28- 29 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Jakarta Utara 2. Bawaslu Jakarta Utara 3. Panwacam Jakarta Utara 4. PPK Jakarta Utara 5. L.O partai politik peserta pemilu tahun 2024 	
7.	Pemantapan kader bela negara	Hari Senin, tanggal 29 April 2024 bertempat di ruang Fatahilah Blok P Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara. Jalan Yos Sudaroso No 28- 29 tanjung Priok Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. FKPPi Jakarta Utara 2. Laskar Merah Putih Jakarta Utara 3. Pemuda Pancasila Jakarta Utara 4. RAPI Jakarta Utara 5. SENKOM Jakarta Utara 6. Forum Kader Bela Negara Jakarta Utara 	100 orang

2. Dokumentasi



Wawancara dengan Bp. Adam (Idewasbangpol Kesbangpol Kota Jakarta Utara)



Wawancara dengan Bp. Agustono (Ketua Umum Ormas PERKAPJU)



Wawancara Zaki Amir
Siswa SMA 18 Jakarta Utara)



Wawancara dengan LSM
Laskar NKRI

CURICULUM VITAE



Nama : Muhammad Zaky
TTL : Tegal, 20 Desember 2002
Alamat : Palm Asri 1 Blok D1 No. 4 Kec.
Dukuhwaru Kab.Tegal
NIM : 2106016105
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Soisal dan Ilmu Politik
IPK : 3,74
Agama : Islam
E-mail : muhammad.zaky2nd@gmail.com
HP : 082128713707

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Luqman Al-Hakim Slawi
2. SMP Binaul Ummah Kuningan
3. SMA Binaul Ummah Kuningan
4. S1 ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

RIWASAT ORGANISIASI

1. DEMA Fisip Uin Walisong Semarang 2023-2024
2. Ruang Abaca 2022-2023